

**PENGARUH PEMAHAMAN PERPAJAKAN DAN  
PENERAPAN AKUNTANSI TERHADAP KEPATUHAN WAJIB  
PAJAK UMKM PADA KPP PRATAMA MEDAN BARAT**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)**



**Oleh:**

**Nama : Almira Zulaika**

**NPM : 1905170143**

**Program Studi : Akuntansi**

**Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**M E D A N**

**2023**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapel. Mochtar Basri No. 3 (661) 64124567 Medan 20256

**PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI**

Panitia Ujian Strata-I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada Hari Rabu, Tanggal 13 September 2023, Pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya:

**MEMUTUSKAN**

Nama : ALMIRA ZULAIKA  
 NPM : 1905170143  
 Program Studi : AKUNTANSI  
 Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN  
 Judul Skripsi : PENGARUH PEMAHAMAN TERPAJAKAN DAN PENERAPAN AKUNTANSI TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM PADA KPP PRATAMA MEDAN BARAT.

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

**TIM PENGUJI**

Penguji I

(Dr. Hj. SYAFKIDA HANI, S.E., M.Si)

Penguji II

(DIAN YESTRIAWAN, S.E., M.Si)

Pemangku

(ELIZAR SINAMBELA, SE., M.Si)

**PANITIA UJIAN**

Revisi

Sekretaris

(Assoc. Prof. Dr. H. JANURI, S.E., M.P., M.Si)

(Assoc. Prof. Dr. ADE GUNAWAN, S.E., M.Si)



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENGESAHAN SKRIPSI**

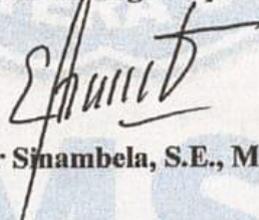
Skripsi ini disusun oleh:

Nama : ALMIRA ZULAIKA  
N P M : 1905170143  
Program Studi : AKUNTANSI  
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN  
Judul Skripsi : PENGARUH PEMAHAMAN PERPAJAKAN DAN PENERAPAN  
AKUNTANSI TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK  
UMKM PADA KPP PRATAMA MEDAN BARAT.

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam Ujian Mempertahankan  
skripsi.

Medan, Agustus 2023

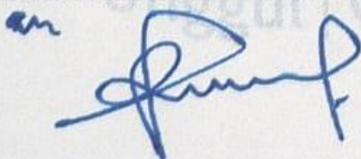
Pembimbing Skripsi



(Elizar Sinambela, S.E., M.Si)

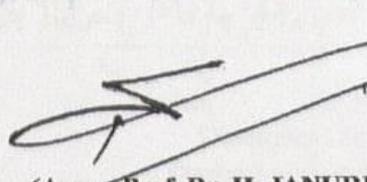
Diketahui/Disetujui  
oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



(Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum, S.E., M.Si)

Dekan  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



(Assoc. Prof. Dr. H. JANURI, S.E., M.M., M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Almira Zulaika  
NPM : 1905170143  
Program Studi : Akuntansi  
Judul Skripsi : **PENGARUH PEMAHAMAN PERPAJAKAN DAN PENERAPAN AKUNTANSI TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM PADA KPP PRATAMA MEDAN BARAT.**

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa data-data dalam skripsi dan data-data lainnya adalah benar saya peroleh dari Instansi tersebut.

Dan apabila ternyata di kemudian hari data-data dari skripsi ini salah dan merupakan hasil **plagiat** karya orang lain maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi akademik.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, September 2023

Yang membuat pernyataan



ALMIRA ZULAIKA



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

**BERITA ACARA PEMBIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Lengkap : Almira Zulaika  
N.P.M : 1905170143  
Program Studi : Akuntansi  
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan  
Nama Dosen Pembimbing : Elizar Sinambela, SE., M.Si  
Judul Penelitian : Pengaruh Pemahaman Perpajakan dan Penerapan Akuntansi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM pada KPP Pratama Medan Barat

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	- Masalah penelitian harus lebih jelas dan fokus - Rumus masalah diperbaiki	4/8-23	EH
Bab 2	- Tambah kripin dan hasil penelitian dan yg semi.	8/8-23	EH
Bab 3	- Daftar Questioner & Lampiran - Pasrah alat analisis data	15/8-23	EH
Bab 4	- Analisis Statistik Deskriptif - Pembahasan Penelitian - Pasrah hasil analisis.	22/08-2023	EH
Bab 5	- Pasrah Kesimpulan menjawab Rumus masalah.	25/8-2023	EH
Daftar Pustaka	- Daftar pustaka sesuai kram diya ini - Buat Abstrak.	25/8-2023	EH
Persetujuan Sidang Meja Hijau	Selesai Pembimbingan. Ace diujikan pada Sidang Meja Hijau.	26/8-23	EH

Medan, Agustus 2023

Disetujui Oleh  
Dosen Pembimbing

Diketahui oleh:  
Ketua Program Studi

(Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum, S.E., M.Si)

(Elizar Sinambela, SE., M.Si)

## **ABSTRAK**

### **PENGARUH PEMAHAMAN PERPAJAKAN DAN PENERAPAN AKUNTANSI TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMKM) PADA KPP PRATAMA MEDAN BARAT**

**Almira Zulaika**

Program Studi Akuntansi  
almirazulaika@gmail.com

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang memiliki peran penting, sehingga kepatuhan wajib pajak, terutama dari sektor UMKM yang sedang berkembang pesat, memiliki peran dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemahaman perpajakan dan penerapan akuntansi terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dengan teknik kuesioner terhadap 100 orang wajib pajak pelaku UMKM pada KPP Pratama Medan Barat, yang berfokus pada tingkat pemahaman perpajakan dan penerapan akuntansi yang diterapkan oleh UMKM tersebut. Selanjutnya data dianalisis menggunakan analisis statistik deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, dan uji hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan dan penerapan akuntansi berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM pada KPP Pratama Medan Barat.

**Kata Kunci: Pemahaman Perpajakan, Penerapan Akuntansi, Kepatuhan Wajib Pajak, UMKM, Pajak.**

## **ABSTRACT**

### ***THE INFLUENCE OF TAX UNDERSTANDING AND ACCOUNTING IMPLEMENTATION ON MICRO, SMALL, AND MEDIUM ENTERPRISES (MSME) TAXPAYER COMPLIANCE AT KPP PRATAMA MEDAN BARAT***

***Almira Zulaika***

*Departement of Accounting*

*almirazulaika@gmail.com*

*Tax is a source of state revenue that has an important role, so taxpayer compliance, especially from the MSME sector, which is overgrowing, has a role in maintaining national economic stability. This study aims to determine the effect of tax understanding and accounting application on Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) taxpayer compliance. This research is a type of quantitative research using a questionnaire technique on 100 taxpayers of MSME actors at KPP Pratama Medan Barat, which focuses on the level of understanding of taxation and the application of accounting by these MSME. Furthermore, the data were analyzed using descriptive statistical analysis, data quality test, classical assumption test, multiple linear regression analysis, and hypothesis testing. The results showed that understanding taxation and the application of accounting had a partial and simultaneous effect on the taxpayer compliance of MSME actors at KPP Pratama Medan Barat.*

***Keywords: Understanding of Taxation, Application of Accounting, Taxpayer Compliance, SMEs, Taxes.***

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamualaikum wr.wb*

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan rahmat yang melimpah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Tak lupa, penulis juga mengirimkan Shalawat dan Salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa Risalahnya kepada seluruh umat manusia dan menjadi suri tauladan bagi kita semua. Penelitian ini merupakan kewajiban bagi peneliti untuk melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan program pendidikan Sastra 1 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Adapun judul penelitiannya yaitu: **“Pengaruh Pemahaman Perpajakan dan Penerapan Akuntansi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM pada KPP Pratama Medan Barat”**

Melalui halaman ini, peneliti mempersembahkan skripsi ini untuk orang tua tercinta Bapak Syawaluddin (Alm), Ibu Yusnita, dan Bapak Muhammad Khusmiadi dan adik-adik yang selalu memberikan kasih sayang, memotivasi dan memberikan dukungan doa untuk penulis. Semoga Allah senantiasa melindungi dan memberikan kesehatan, rezeki serta kebahagiaan dunia dan akhirat aamiin. Serts penulis ingin mengungkapkan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan semangat dan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan dukungan dari semua pihak, skripsi ini tidak akan terwujud. Oleh karena itu, dengan rendah hati, penulis ingin memberikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.A.P. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Assoc. Prof. Dr. H. Januri S.E., M.M., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan S.E., M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Hasrudy Tanjung S.E., M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum S.E., M.Si selaku Ketua Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Riva Ubar Harahap, SE, M.Si., Ak., CA., CPA selaku Sekretaris Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu Elizar Sinambela, S.E., M.Si selaku dosen pembimbing skripsi penulis yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam penyusunan proposal skripsi ini.
8. Bapak Surya Sanjaya, S.E., M.M selaku dosen pembimbing akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. Seluruh Dosen, Pegawai, dan Staff pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
10. Bapak/Ibu pimpinan, pegawai KPP Pratama Medan Barat yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

11. Terima kasih kepada sahabat sekaligus teman seperjuangan penulis sejak SMP dan SMA, yaitu Zhafirah Azzah dan Fahrunnisa. Semoga kita jadi orang sukses bareng-bareng aamiin.

12. Terimakasih kepada BGB Family, teman-teman seperjuangan A3 Akuntansi Malam 2019 yang saling mensupport penulis dalam penyusunan proposal ini.

Penulis sangat menerima kritik dan saran yang membangun dari pembaca untuk menyempurnakan skripsi ini agar lebih bermanfaat dimasa yang akan datang. Akhir kata semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat.

*Wassalamualaikum wr.wb*

Medan, September 2023

Penulis

Almira Zulaika

1905170143

## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	i
<i>ABSTRACT</i> .....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI .....	vi
DAFTAR TABEL .....	ix
DAFTAR GAMBAR .....	xi
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	5
1.3 Batasan Masalah .....	6
1.4 Rumusan Masalah .....	6
1.5 Tujuan Penelitian .....	7
1.6 Manfaat Penelitian.....	7
<b>BAB 2 KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>9</b>
2.1 Landasan Teori .....	9
2.1.1 Kepatuhan Wajib Pajak.....	9
2.1.2 Pemahaman Perpajakan .....	14
2.1.3 Penerapan Akuntansi.....	19
2.2 Penelitian Terdahulu.....	25
2.3 Kerangka Berpikir Konseptual .....	28
2.4 Hipotesis .....	30
<b>BAB 3 METODE PENELITIAN .....</b>	<b>32</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	32
3.2 Definisi Operasional .....	32
3.3 Tempat dan Waktu Penelitian .....	33
3.3.1 Tempat Penelitian .....	33
3.3.2 Waktu Penelitian .....	33
3.4 Teknik Pengambilan Sampel .....	34
3.4.1 Populasi.....	34
3.4.2 Sampel .....	34
3.5 Teknik Pengumpulan Data .....	35
3.6. Teknik Analisis Data.....	36

3.6.1 Analisis Statistik Deskriptif .....	36
3.6.2 Uji Kualitas Data .....	36
3.6.3 Uji Asumsi Klasik .....	37
3.6.4 Analisis Regresi Linear Berganda.....	39
3.6.5 Uji Hipotesis .....	39
<b>BAB 4 PEMBAHASAN .....</b>	<b>42</b>
4.1 Deskripsi Data .....	42
4.1.1 Deskripsi Hasil Penelitian.....	42
4.2 Deskripsi Karakteristik Responden .....	43
4.2.1 Berdasarkan Jenis Kelamin.....	43
4.2.2 Berdasarkan Usia .....	43
4.2.3 Berdasarkan Pendidikan Terakhir .....	44
4.2.4 Berdasarkan Lama Usaha UMKM.....	45
4.2.5 Berdasarkan Jenis Usaha UMKM.....	46
4.3 Analisis Data Penelitian.....	46
4.3.1 Analisis Statistik Deskriptif .....	46
4.3.2 Uji Kualitas Data .....	51
4.3.3 Uji Asumsi Klasik .....	54
4.3.4 Analisis Regresi Linear Berganda.....	58
4.3.5 Uji Hipotesis .....	59
4.3.6 Koefisien Determinasi ( $R^2$ ).....	61
4.4 Pembahasan Penelitian .....	61
4.4.1 Pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.....	61
4.4.2 Pengaruh Penerapan Akuntansi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.....	63
4.4.3 Pengaruh Pemahaman Perpajakan dan Penerapan Akuntansi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM .....	64
<b>BAB 5 PENUTUP.....</b>	<b>66</b>
5.1 Kesimpulan.....	66
5.2 Saran .....	67
5.3 Keterbatasan Penelitian .....	68
vii	
DAFTAR PUSTAKA .....	69
LAMPIRAN .....	74



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM yang Terdaftar pada KPP Pratama Medan Barat 2018 - 2022.....	2
Tabel 2.1 Ilustrasi Elemen Laporan Keuangan SAK EMKM.....	23
Tabel 2.2 Ilustrasi Laporan Keuangan Entitas .....	23
Tabel 2.3 Ilustrasi Laporan Laba Rugi Entitas .....	24
Tabel 2.4 Penelitian Terdahulu.....	26
Tabel 3.1 Tabel Definisi Operasional Variabel.....	32
Tabel 3.2 Skor Skala Likert.....	36
Tabel 4.1 Tingkat Pengembalian Kuesioner.....	42
Tabel 4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	43
Tabel 4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia .....	43
Tabel 4.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan Terakhir....	44
Tabel 4.5 Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Usaha .....	45
Tabel 4.6 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Usaha UMKM.....	46
Tabel 4.7 Hasil Uji Statistik Deskriptif .....	47
Tabel 4.8 Pedoman Kategorisasi Rata-Rata Skor Penilaian Responden Variabel X1 .....	47
Tabel 4.9 Pedoman Kategorisasi Rata – Rata Skor Penilaian Responden Variabel X2.....	49
Tabel 4.10 Pedoman Kategorisasi Rata – Rata Skor Penilaian Responden Variabel Y .....	50
Tabel 4.11 Hasil Uji Validitas Variabel X1 .....	51
Tabel 4.12 Hasil Uji Validitas Variabel X2 .....	52

Tabel 4.13 Hasil Uji Validitas Variabel Y .....	53
Tabel 4.14 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Penelitian .....	54
Tabel 4.15 Hasil Uji Normalitas <i>One-Sample Kolmogorov Smirnov Test</i> .....	54
Tabel 4.16 Hasil Uji Multikolinearitas.....	56
Tabel 4.17 Hasil Uji Regresi Linear Berganda .....	58
Tabel 4.18 Hasil Uji Parsial (Uji t) .....	59
Tabel 4.19 Hasil Uji Simultan (Uji f).....	60
Tabel 4.20 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R <sup>2</sup> ).....	61

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1 Ilustrasi Catatan Atas Laporan Keuangan.....	25
Gambar 2.2 Kerangka Konseptual .....	30
Gambar 3.1 Waktu Penelitian .....	33
Gambar 4.1 Uji Normalitas Probability Plot.....	55
Gambar 4.2 Uji Heteroskedastisitas .....	57

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Isu kepatuhan wajib pajak merupakan masalah yang krusial diberbagai belahan dunia, baik di negara maju maupun negara berkembang. Ketika wajib pajak tidak mematuhi kewajibannya hal tersebut cenderung mendorong mereka untuk mencari cara untuk menghindari pembayaran pajak. Akibatnya, tindakan tersebut dapat berdampak negatif pada penerimaan pajak, yang mengakibatkan penurunan jumlah pajak yang diterima negara. Kepatuhan wajib pajak adalah saat wajib pajak mematuhi segala kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Nurchamid & Sutjahyani, 2018), dan ketidakpatuhan pajak merupakan situasi dimana wajib pajak tidak memenuhi semua tanggung jawab dan hak perpajakannya (Jayanto, 2011). Kaitan kepatuhan wajib pajak dengan perpajakan itu sendiri adalah sebagai kewajiban bagi individu atau entitas yang terlibat dalam aktivitas perpajakan untuk mematuhi aturan yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku (Fitria, 2017).

Terdapat dua jenis kepatuhan wajib pajak menurut (Faisal & Yulianto, 2019) yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal merujuk pada kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi ketentuan formal perpajakan, meliputi pendaftaran NPWP tepat waktu, perhitungan pajak tepat waktu, penyetoran pajak terutang tepat waktu, dan pelaporan pajak tepat waktu. Sedangkan kepatuhan material merujuk pada ketaatan wajib pajak dalam memenuhi ketentuan materi perpajakan, yang meliputi perhitungan perhitungan pajak yang sesuai dengan peraturan perpajakan.

Sistem pemungutan yang berlaku di Indonesia saat ini adalah *self-assessment system* yang sebelumnya adalah *official assessment system*. Dalam *self-assessment system*, wajib pajak diberikan kepercayaan, wewenang, dan tanggung jawab untuk menghitung, melaporkan, dan membayar sendiri jumlah pajak yang dibayar (Waluyo & Anggraini, 2014). Sistem ini menuntut partisipasi aktif dari wajib pajak untuk mematuhi ketentuan perpajakan dalam melaksanakan kewajiban mereka (Adiman, 2020). Fungsi fiskus dalam sistem ini hanya sebatas memberikan penerangan dan mengawasi pelaksanaan pemungutan pajak oleh wajib pajak (Palalangan et al., 2019). Sehingga kepatuhan wajib pajak merupakan kunci utama dalam keberhasilan *self-assessment system* (Rahayu, 2017).

Saat ini pemerintah mulai menaruh perhatian pada sektor swasta yang memiliki potensi besar untuk melaporkan pajaknya, yaitu dari Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Data Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2021 yang dikutip dalam ([www.ekon.go.id](http://www.ekon.go.id)) menunjukkan bahwa jumlah UMKM di Indonesia mencapai 64,2 juta dan memberikan kontribusi sebesar 61,07% atau senilai Rp8.573,89 triliun terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

**Tabel 1.1**  
**Data Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM yang Terdaftar pada KPP**  
**Pratama Medan Barat Tahun 2018-2022**

Tahun	Jumlah WP UMKM Terdaftar (Pribadi + Badan)	Jumlah WP UMKM Lapor SPT (Pribadi + Badan)	Persentase Kepatuhan	Realisasi Penerimaan
2018	16.435	11.633	70,79%	73.261.445.069
2019	18.216	12.416	68,16%	59.990.441.709
2020	18.806	10.635	56,56%	42.040.191.398
2021	19.100	8.166	42,76%	46.756.694.893
2022	19.360	9.403	48,57%	49.151.344.855

Sumber: KPP Pratama Medan Barat 2023 (data diolah penulis)

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2018 – 2022 jumlah wajib pajak UMKM pada KPP Pratama Medan Barat yang terdaftar semakin

meningkat setiap tahunnya sedangkan wajib pajak UMKM yang melaporkan SPT nya cenderung menurun dan persentasenya sangat rendah yaitu hanya sekitar 42,76% hingga 70,79%, sehingga menyebabkan realisasi penerimaan perpajakan dari sektor UMKM belum maksimal. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat ketidakpatuhan wajib pajak UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Menurut (Kastolani & Ardiyanto, 2017) “Penerimaan pajak penghasilan dapat berjalan dengan baik apabila setiap wajib pajak berlaku patuh dalam menjalankan kewajiban membayar pajak, dan kepatuhan dapat diwujudkan dengan secara tepat waktu dalam menyampaikan SPT setiap tahunnya”.

Kementerian koperasi dan UMKM menyebutkan kesadaran dan kepatuhan pajak sektor UMKM masih menjadi tantangan dalam mengoptimalkan penerimaan pajak dari segmen bisnis UMKM. Staff Ahli Ekonomi Makro Kementerian Koperasi dan UMKM, Rulli Nuryanto, menjelaskan beberapa isu yang menjadi tantangan dalam menaikkan kesadaran dan kepatuhan UMKM dalam bidang perpajakan diantaranya minimnya pemahaman pelaku UMKM terkait dengan fasilitas PPh final 0,5% yang diatur dalam PP No. 23 Tahun 2018, yaitu masih banyak pelaku UMKM yang belum mengetahui skema tarif dan perhitungan pajak setelah pemanfaatan insentif PPh final tersebut, sanksi pajak terutang dan pajak terutang dalam menentukan beban pajak atas usahanya. Selain itu, UMKM juga memerlukan banyak pengetahuan dan informasi perihal standar akuntansi keuangan bagi UMKM (Redaksi DDTCNews, 2021)

Dari beberapa penelitian terdahulu ditemukan beberapa fenomena terkait pemahaman perpajakan dan penerapan akuntansi pada UMKM. Menurut hasil penelitian (Ningsih & Saragih, 2020) yang dilakukan pada UMKM di Kecamatan

Medan Barat, Wajib Pajak UMKM sudah memiliki izin usaha dan NPWP tetapi belum mengetahui dan belum paham mengenai ketentuan pajak PP No. 46 Tahun 2013 dan perubahannya PP No. 23 Tahun 2018 terkait penurunan tarif pajak UMKM, dan sebagian pelaku UMKM hanya mengetahui tarif pajaknya saja tetapi tidak mengetahui secara jelas isi ketentuan pajak UMKM tersebut. Dan menurut hasil penelitian oleh (Dewi, 2020) penyusunan laporan keuangan yang dilakukan oleh UMKM masih sederhana dan berdasarkan kebutuhan dan pemahaman pribadi. Pelaku UMKM tidak menyusun laporan sesuai dengan SAK EMKM diakibatkan oleh keterbatasan waktu, pemahaman tentang akuntansi dan SAK EMKM yang menyebabkan pelaku UMKM tidak menghitung pajak penghasilannya dengan benar.

Pemahaman perpajakan adalah kondisi dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan menerapkannya dalam pembayaran pajak (K. J. Putri & Setiawan, 2017). Pemahaman tentang peraturan perpajakan merupakan faktor internal yang dapat dikontrol oleh wajib pajak sendiri. Serta tingkat pemahaman yang berbeda-beda akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak dengan pemahaman perpajakan yang tinggi cenderung lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Palalangan et al., 2019). Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh (Amrullah et al., 2022) pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, hal ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh (Indrawan & Binekas, 2018) yang menyatakan bahwa pemahaman pajak dan pengetahuan pajak memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Kemampuan UMKM dalam mengelola keuangan bisnisnya juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak dari sektor UMKM karena untuk mengelola keuangan bisnis dengan baik, UMKM perlu memiliki pemahaman yang memadai dalam bidang akuntansi, yang tercermin dalam penerapan prinsip akuntansi yang sesuai untuk UMKM (Y. M. Azmary et al., 2020). Berdasarkan hasil penelitian terdahulu oleh (Y. M. Azmary et al., 2020) penerapan akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Darmawati & Oktaviani, 2018) bahwa penerapan akuntansi UMKM berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan uraian diatas dan penelitian terdahulu, maka penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh pemahaman perpajakan dan penerapan akuntansi terhadap kepatuhan wajib pajak dengan objek penelitian UMKM yang terdaftar pada KPP Pratama Medan Barat. Untuk itu penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pemahaman Perpajakan dan Penerapan Akuntansi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM pada KPP Pratama Medan Barat”**.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Kepatuhan wajib Pajak UMKM masih rendah sekitar 42,76% hingga 70,79% saja, meskipun jumlah UMKM yang terdaftar setiap tahunnya meningkat.

2. Pemahaman wajib pajak UMKM mengenai ketentuan perpajakan UMKM masih rendah, meskipun telah memiliki NPWP dan izin usaha.
3. Masih ada pelaku UMKM yang belum menerapkan akuntansi sesuai SAK EMKM sehingga tidak menghitung pajaknya dengan benar.

### **1.3 Batasan Masalah**

Untuk memfokuskan penelitian ini, peneliti memberi batasan masalah terkait pengukuran variabel yang digunakan, yaitu sebagai berikut:

1. Kepatuhan wajib pajak: kepatuhan mendaftarkan diri, menghitung, membayar, serta melaporkan pajak tepat waktu.
2. Pemahaman perpajakan: pengetahuan mengenai sistem perpajakan saat ini yaitu *self-assessment system* dan tarif pajak, ketentuan umum dan tata cara perpajakan yaitu berfokus pada NPWP dan SPT, serta pengetahuan mengenai fungsi pajak.
3. Penerapan akuntansi: pencatatan dan penyusunan laporan keuangan menggunakan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (SAK EMKM).

### **1.4 Rumusan Masalah**

1. Apakah pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pada KPP Pratama Medan Barat?
2. Apakah penerapan akuntansi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pada KPP Pratama Medan Barat?

3. Apakah pemahaman perpajakan dan penerapan akuntansi berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pada KPP Pratama Medan Barat?

### **1.5 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini dilakukan, yaitu:

1. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pada KPP Pratama Medan Barat.
2. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh penerapan akuntansi terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pada KPP Pratama Medan Barat.
3. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh secara simultan antara pemahaman perpajakan dan penerapan akuntansi terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pada KPP Pratama Medan Barat.

### **1.6 Manfaat Penelitian**

1. Memberikan informasi kepada pihak yang berwenang tentang pentingnya memberikan pendidikan dan informasi perpajakan serta akuntansi kepada UMKM agar mereka dapat memahami pentingnya kewajiban perpajakan dan penerapan akuntansi dalam menjalankan usahanya.
2. Memberikan informasi kepada UMKM tentang pentingnya pemahaman perpajakan dan penerapan akuntansi agar mereka dapat memenuhi kewajiban perpajakan dan mengelola keuangan usahanya dengan baik.
3. Menambah literatur dan pengetahuan dalam bidang akuntansi dan perpajakan, khususnya konteks UMKM.

4. Menyumbangkan pengetahuan dan informasi yang berguna bagi penelitian lain yang ingin melakukan penelitian serupa.

## **BAB 2**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Kepatuhan Wajib Pajak**

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan kepatuhan sebagai suatu sikap yang patuh dan tunduk pada ajaran serta aturan. Kata “patuh” diartikan sebagai suka menuruti perintah dan taat pada perintah atau aturan. Sehingga kepatuhan dapat diartikan sebagai perilaku positif yang menunjukkan sikap patuh dalam mematuhi peraturan atau mengikuti perintah yang diberikan. Ketundukan dan ketaatan kepada aturan atau ketentuan umum yang berlaku sering dikaitkan dengan syarat kepatuhan. Artinya patuh berarti mematuhi aturan yang ada dan melaksanakannya tanpa mencari cara untuk menghindar. Sehingga kepatuhan terhadap pajak adalah kondisi di mana seseorang memiliki kerelaan dan kemauan untuk mematuhi semua peraturan perpajakan yang ada. (Putra, 2020)

Kepatuhan wajib pajak juga merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan dewasa ini yang diharapkan didalam pemenuhannya diberikan secara sukarela. (Saragih, 2017)

Kepatuhan Wajib Pajak merupakan situasi di mana Wajib Pajak mematuhi segala kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Hal ini meliputi kewajiban untuk menyampaikan kembali surat pemberitahuan serta memastikan perhitungan yang akurat mengenai tunggakan pajak yang harus dibayar (Nurchamid & Sutjahyani, 2018).

Menurut Gunadi dalam (Oktaviani & Adellina, 2016), kepatuhan Wajib Pajak adalah ketika Wajib Pajak secara sukarela memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku, tanpa perlu melakukan pemeriksaan, investigasi mendalam, peringatan atau bahkan ancaman, baik dalam penerapan sanksi hukum dan administrasi.

Dalam konteks perpajakan, kepatuhan dapat diartikan sebagai tindakan patuh, tunduk, dan mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Sehingga, Wajib Pajak yang patuh dapat diartikan sebagai Wajib Pajak yang memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jika seseorang sudah menyadari bahwa membayar pajak adalah kewajibannya, maka ia akan taat dalam membayar pajak pada waktu yang tepat. Selain itu, seseorang juga akan mematuhi kewajiban membayar pajak pada waktunya meskipun orang lain di sekitarnya belum atau sudah melakukannya, karena menyadari bahwa membayar pajak adalah konsekuensi dari status sebagai Wajib Pajak (Dahrani et al., 2021).

Untuk memenuhi kewajiban perpajakan, seseorang harus memenuhi ketentuan hukum perpajakan, yakni dengan menyatakan pendapatan dengan benar, mengklaim pengeluaran yang sesuai dengan haknya, serta membayar pajak yang tepat pada waktu yang ditentukan. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan utama dari kepatuhan perpajakan adalah untuk mematuhi undang-undang perpajakan, yang berarti seseorang dengan sengaja berusaha untuk memenuhi kewajibannya. (Ken Davos, 2013)

Jenis kepatuhan Wajib Pajak dalam buku (Rahayu, 2010) ada dua, yaitu:

- a. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan di mana Wajib Pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan.
- b. Kepatuhan material adalah suatu keadaan di mana Wajib Pajak memenuhi kewajiban secara substansial sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan.

Menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000, seorang Wajib Pajak dapat dianggap sebagai Wajib Pajak yang patuh jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Mengirimkan Surat Pemberitahuan (SPT) tepat waktu untuk semua jenis pajak selama dua tahun terakhir.
- b. Tidak memiliki hutang pajak untuk semua jenis pajak kecuali jika telah mendapat izin untuk membayar secara angsuran atau menunda pembayaran.
- c. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam sepuluh tahun terakhir.
- d. Telah melakukan pembukuan sesuai dengan Pasal 28 UU KUP selama dua tahun pajak terakhir, dan jika pernah diperiksa, koreksi atas pemeriksaan terakhir tidak melebihi dari 5% untuk setiap jenis pajak.
- e. Laporan keuangan harus telah diaudit oleh akuntan publik dengan opini wajar tanpa pengecualian atau pendapat dengan pengecualian selama dua tahun terakhir

Terdapat tujuh indikator kepatuhan Wajib Pajak menurut (Subekti & Adib, 2018), yaitu:

- a. Ketersediaan Wajib Pajak untuk melakukan estimasi pajak.

- b. Ketaatan Wajib Pajak terhadap kesalahan pajak.
- c. Patuhnya Wajib Pajak terhadap perlakuan pajak.
- d. Wajib Pajak memenuhi kewajiban pemenuhan SPT Masa.
- e. Wajib Pajak taat dalam pemenuhan SPT Tahunan.
- f. Ketersediaan Wajib Pajak untuk membayar pajak.
- g. Wajib Pajak menghadapi konsekuensi kekurangan pembayaran pajak.

Menurut hasil penelitian oleh (Tristiawan et al., 2021) ada faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak, yaitu:

- a. Sosialisasi Perpajakan

Dengan melakukan sosialisasi perpajakan secara teratur dan memberikan penyuluhan serta memasang informasi melalui spanduk atau *billboard*, diharapkan kegiatan sosialisasi ini dapat meningkatkan pemahaman Wajib Pajak tentang pentingnya perpajakan bagi negara dan memotivasi mereka untuk selalu memenuhi kewajiban pajaknya.

- b. Tarif Pajak

Tarif pajak yang ditetapkan telah sesuai dengan aturan perpajakan dan sejalan dengan penghasilan Wajib Pajak. Salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak UMKM adalah memberikan pengurangan tarif pajak khusus untuk UMKM. Hal ini diharapkan dapat membantu mengurangi beban pajak bagi Wajib Pajak UMKM dan bisa meningkatkan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakannya.

- c. Mekanisme Pembayaran Pajak

Informasi tentang cara pembayaran pajak dan langkah-langkah perhitungan dapat membantu Wajib Pajak memahami proses pengisian SPT, menghitung jumlah

pajak yang benar, melaporkan pajak secara rutin, dan membayar pajak tepat waktu. Hal ini dapat mendorong Wajib Pajak untuk mematuhi aturan perpajakan karena mereka dapat melakukan transaksi dengan mudah.

d. Kesadaran Membayar Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh kesadaran yang muncul dari dalam diri sendiri, seperti pikiran dan perasaan yang muncul akibat cinta tanah air dan tanggung jawab untuk berkontribusi dalam pembangunan negara.

e. Sanksi Pajak

Setiap pelanggaran aturan perpajakan akan mendapatkan sanksi pajak yang sesuai, baik dari pelanggaran ringan atau berat. Ketegasan dan tidak adanya toleransi dalam memberikan sanksi dapat mendorong rasa takut dan jera pada Wajib Pajak yang tidak patuh.

Menurut (Olivianity et al., 2021) yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak adalah sebagai berikut:

a. Tarif Pajak

Tujuan penurunan tarif PPh Final UMKM adalah untuk mendorong kepatuhan Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakan serta menegakkan keadilan. Dengan adanya tarif pajak yang adil dan tidak memberatkan Wajib Pajak UMKM, dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

b. Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan

Untuk dapat memenuhi kewajiban perpajakannya, Wajib Pajak harus memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup mengenai peraturan perpajakan yang berlaku. Sehingga semakin tinggi pengetahuan dan perpajakan yang dimiliki,

maka semakin besar pula kemungkinan Wajib Pajak UMKM untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara konsisten.

c. Tingkat Kepercayaan pada Sistem Hukum dan Pemerintahan

Dalam membayar pajak, Wajib Pajak mengharapkan sistem hukum dan pemerintahan dapat dipercaya dan sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku. Kepercayaan pada negara untuk mengelola dana pajak dengan baik akan memotivasi Wajib Pajak untuk mematuhi dan memenuhi kewajiban perpajakannya.

### **2.1.2 Pemahaman Perpajakan**

Pemahaman mengenai peraturan perpajakan adalah suatu proses di mana individu yang memiliki kewajiban pajak memahami dan mengerahui berbagai peraturan, undang-undang, serta prosedur dalam sistem perpajakan, dan mengimplementasikannya dalam menjalankan aktivitas perpajakan. Jika seseorang telah memahami dan mengerti mengenai perpajakan, maka akan meningkatkan kepatuhan dari Wajib Pajak. (Adiasa, 2013 dalam (Wijayanti & Sasongko, 2017)

Pemahaman terhadap peraturan perpajakan mencerminkan kemampuan individu untuk mengintegrasikan semua informasi yang terkait dengan peraturan perpajakan yang telah dipelajari atau dialami sebelumnya oleh seorang Wajib Pajak (Deo et al., 2022). Pengetahuan perpajakan tersebut dibutuhkan bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sejalan dengan diberlakukannya sistem pemungutan pajak dengan menggunakan *self-assessment system* (Bahri, 2020).

Pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan adalah proses di mana Wajib Pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak. Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan yang dimaksud mengerti dan paham tentang ketentuan umum dan tata

cara perpajakan (KUP) yang meliputi tentang bagaimana cara menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), pembayaran pajak, tempat pembayaran pajak, denda dan batas waktu pembayaran atau pelaporan SPT (Asterina & Septiani, 2019).

Tingkat pemahaman pajak apabila dilihat dari perspektif hukum adalah suatu perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara dan negara mempunyai kekuatan untuk memaksa dan uang pajak tersebut harus dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan (Indrawan & Binekas, 2018).

### **2.1.2.1 Indikator Pemahaman Perpajakan**

Berdasarkan konsep pengetahuan dan pemahaman pajak menurut Siti (2017: 141) yang dikutip dalam (Asterina & Septiani, 2019) terdapat beberapa indikator Wajib Pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan, yaitu:

1. Pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

Ketentuan umum perpajakan dan tata cara perpajakan sudah diatur dalam UU No. 16 tahun 2009 yang pada prinsipnya diberlakukan bagi undang-undang pajak material.

- a. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. NPWP berfungsi sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dan

untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan. (Mardiasmo, 2019)

b. Surat Pemberitahuan (SPT)

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Fungsi SPT bagi Wajib Pajak, Pajak Penghasilan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP), fungsi SPT adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang sebenarnya terutang. Bagi pemotongan atau pemungut pajak, fungsi SPT adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya (Mardiasmo, 2019)

c. Kewajiban Wajib Pajak

- Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP.
- Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).
- Menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar.
- Mengisi dengan benar SPT, dan memasukkan ke Kantor Pelayanan Pajak dalam batas waktu yang ditentukan.

- Menyelenggarakan pembukuan/pencatatan (Mardiasmo, 2019)

d. Hak – Hak Wajib Pajak

- Mengajukan surat keberatan dan surat banding.
- Menerima tanda bukti pemasukan SPT.
- Melakukan pembetulan SPT yang telah dimasukkan.
- Mengajukan permohonan penundaan atau pengansuran pembayaran pajak.
- Mengajukan permohonan perhitungan pajak yang dikenakan dalam surat keterangan pajak.
- Meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
- Mengajukan permohonan penghapusan dan pengurangan sanksi, serta pembetulan surat ketetapan pajak yang salah.
- Memberi kuasa kepada orang untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.
- Meminta bukti pemotongan atau pemungutan pajak (Mardiasmo, 2019)

e. Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan ditaati, atau sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan.

- Sanksi Administrasi: Merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya yang berupa bunga dan kenaikan.

- Sanksi Pidana: Merupakan siksaan atau penderitaan, yang merupakan jalan terakhir yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi (Mardiasmo, 2019)

## 2. Pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia.

a. Sistem perpajakan di Indonesia saat ini adalah *self-assessment system* yaitu pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan tanggung jawab pada Wajib Pajak untuk menghitung, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

### b. Tarif Pajak

- PP No. 46 Tahun 2013 (Berlaku 1 Juli 2013): tarif final 1%.
- PP No. 23 Tahun 2018 (Berlaku 1 Juli 2018): tarif final 0,5% dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam satu tahun pajak.
- PP No. 55 Tahun 2022 (Berlaku 20 Desember 2022): tarif final 0,5% dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam satu tahun pajak. Namun, bagi Wajib Pajak orang pribadi dengan peredaran bruto sampai dengan Rp500 juta dalam satu tahun pajak tidak dikenakan PPh Final 0,5% (A. E. Putri, 2023)

## 3. Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan

Terdapat 2 fungsi perpajakan, yaitu:

- Fungsi penerimaan (*Budgetery*), pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-

pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

- Fungsi mengatur (*Reguler*), pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kewajiban di bidang ekonomi dan sosial.

### **2.1.3 Penerapan Akuntansi**

Definisi akuntansi adalah proses sistematis dan kronologis dari pencatatan, pengelompokan, dan pengikhtisaran transaksi keuangan yang diungkapkan dalam bentuk laporan keuangan. Tujuan laporan keuangan tersebut adalah memberikan informasi yang berguna bagi pihak yang memerlukan dalam proses pengambilan keputusan (Purnairawan & Sastroatmodjo, 2021)

Pentingnya informasi akuntansi yang akurat dan tepat sangat penting dalam mencapai keberhasilan usaha, termasuk bagi UMKM. Informasi akuntansi yang dapat diandalkan merupakan dasar dalam mengambil keputusan ekonomis dalam pengelolaan usaha kecil. Keputusan tersebut mencakup pengembangan pasar, penentuan biaya produksi, penetapan harga, pengendalian asset, pengendalian kewajiban dan modal, perencanaan pendapatan dan efisiensi biaya serta penetapan pajak (Rusmianto, 2011). Untuk menyusun laporan keuangan, UMKM harus disiplin dalam mencatat setiap transaksi dalam jurnal atau laporan keuangan, serta mendokumentasikan setiap bukti transaksi untuk mempermudah pencatatan keuangan (Mulyani et al., 2019).

Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi. Menurut Elizar dkk (2013, hal 27) yang dikutip dalam (Saragih & SE, 2017) laporan keuangan adalah laporan yang menggambarkan keadaan aset, kewajiban, ekuitas,

pendapatan dan biaya biaya yang terjadi dalam suatu perusahaan. Laporan keuangan ini disusun secara periodik, minimal setahun sekali.

### **2.1.3.1 Faktor yang Mempengaruhi Penerapan Akuntansi pada UMKM**

Menurut (Naomi, 2021) ada beberapa faktor yang mempengaruhi penerapan akuntansi pada UMKM adalah sebagai berikut:

#### **a. Tingkat Pendidikan**

Pemilik atau manajer UMKM dengan tingkat Pendidikan formal yang lebih rendah, seperti Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) cenderung memiliki pengetahuan akuntansi yang lebih sedikit dibandingkan dengan mereka yang memiliki pendidikan formal yang lebih tinggi khususnya jurusan akuntansi atau bisnis. Hal ini disebabkan karena materi akuntansi yang lebih mendalam dan lengkap biasanya diajarkan di perguruan tinggi. Sehingga, berdasarkan pengetahuan yang dimiliki pemilik atau manajer UMKM dengan pendidikan formal yang lebih tinggi akan lebih memahami pentingnya penggunaan informasi akuntansi dalam menjalankan bisnis UMKM mereka.

#### **b. Skala Usaha**

Skala usaha berkaitan dengan seberapa kompleks dan banyak transaksi yang dimiliki oleh sebuah usaha. Semakin besar skala usaha, maka semakin kompleks pula aktivitas usaha dan semakin banyak pula jumlah transaksi yang terjadi. Kondisi ini memacu pemilik atau manajer untuk menyadari pentingnya penerapan akuntansi untuk usahanya. Dalam konteks UMKM skala usaha dibagi menjadi skala usaha mikro, skala usaha kecil, dan skala usaha menengah.

#### **c. Umur Perusahaan**

Kelangsungan hidup suatu usaha salah satunya bergantung dari dukungan para *stakeholder*. Semakin lama umur suatu perusahaan, maka semakin banyak pula informasi akuntansi yang diperoleh usahanya. Dalam konteks UMKM, informasi akuntansi dapat digunakan untuk mengajukan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan untuk keperluan para investor untuk mempertimbangkan apakah mereka ingin berinvestasi pada suatu usaha atau tidak. Cara untuk menyediakan informasi akuntansi yang baik adalah dengan cara penerapan akuntansi yang baik bagi UMKM sehingga informasi yang ada dapat terorganisir.

d. Pelatihan Akuntansi

Pelatihan akuntansi mempengaruhi penerapan akuntansi pada UMKM. Pemilik atau manajer yang rutin mengikuti pelatihan akuntansi dapat meningkatkan kinerja mereka dalam mengelola keuangan perusahaan, serta meningkatkan kemampuan mereka dalam menyusun laporan keuangan bagi perusahaan.

e. Pengetahuan Akuntansi

Kemampuan pemilik atau manajer dalam melakukan proses pencatatan hingga pelaporan keuangan perusahaan merupakan salah satu indikator dari pengetahuan akuntansi. Artinya penerapan akuntansi mencerminkan tingkat pengetahuan akuntansi pemilik atau manajer, semakin baik pengetahuan akuntansinya maka diikuti juga oleh penerapan akuntansinya untuk UMKM.

### **2.1.3.2 Siklus Akuntansi**

Kata siklus menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah putaran waktu yang di dalamnya terdapat rangkaian kejadian yang berulang-ulang secara tetap dan teratur. Akuntansi adalah sebuah sistem informasi keuangan yang menghasilkan laporan keuangan. Proses penyusunan laporan keuangan itu

dilakukan melalui siklus akuntansi. Siklus akuntansi keuangan dimulai dari adanya transaksi keuangan atau transaksi bisnis yang menghasilkan bukti transaksi.

Berikut merupakan tahap siklus akuntansi menurut (Sri Hartati, 2020):

1. Tahap Pencatatan

Tahap ini adalah tahap dimulainya siklus akuntansi yaitu pelaksanaan pencatatan bukti transaksi keuangan yang muncul akibat adanya transaksi keuangan. Tahap ini terdiri atas: Pencatatan dalam jurnal umum, *posting* ke dalam buku besar dan pencatatan dalam neraca saldo.

2. Tahap Pengikhtisaran

Tahap ini adalah tahap yang dilakukan setelah tahap pencatatan. Tahap ini terdiri atas: Penyusunan jurnal penyesuaian, pembuatan jurnal pembalik, dan pembuatan neraca lajur atau kertas kerja.

3. Tahap Pelaporan

Tahap ini merupakan tahap terakhir di mana tahap ini hanya dapat dilakukan setelah tahap pencatatan dan pengikhtisaran sudah dilakukan. Tahap ini terdiri atas: Pembuatan laporan keuangan, pembuatan jurnal penutup, dan pembuatan neraca saldo setelah penutupan.

### **2.1.3.3 SAK EMKM**

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) disusun untuk memenuhi kebutuhan pelaporan keuangan entitas dengan skala mikro, kecil dan menengah. Standar ini dirancang untuk digunakan oleh entitas yang belum memenuhi persyaratan akuntansi yang diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan Entitas Terbatas (SAK ETAP). Penerapan SAK EMKM mulai berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2018 (Ikatan Akuntan Indonesia, n.d.)

SAK EMKM bertujuan untuk menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan performa keuangan suatu organisasi yang berguna bagi pengguna untuk mengambil keputusan ekonomi.

Elemen Laporan Keuangan SAK EMKM:

**Tabel 2.1**  
**Ilustrasi Elemen Laporan Keuangan SAK EMKM**

ENTITAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 20X8 DAN 20X7	
<b>DAFTAR ISI</b>	
LAPORAN POSISI KEUANGAN	Rp. xxx
LAPORAN LABA RUGI	Rp. xxx
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	Rp. xxx

Sumber: www.iaiglobal.or.id

1. Laporan Posisi Keuangan (Neraca)

Laporan yang menggambarkan aset (harta), liabilitas (kewajiban/utang), dan ekuitas (modal) entitas per suatu tanggal akhir periode. Laporan posisi keuangan ini ibarat potret kondisi keuangan entitas pada suatu titik tertentu.

Informasi yang disajikan dalam laporan posisi keuangan (neraca): a). kas dan setara kas. b). piutang; c). persediaan. d). aset tetap. e). utang usaha; f). utang bank. g). ekuitas.

**Tabel 2.2**  
**Ilustrasi Laporan Posisi Keuangan Entitas**

ENTITAS LAPORAN POSISI KEUANGAN 31 DESEMBER 20X8 DAN 20X7		
ASET	20X8	20X7
Kas dan setara kas	xxx	xxx
Kas	xxx	xxx
Giro	xxx	xxx
Deposito	xxx	xxx
<b>Jumlah kas dan setara kas</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
Piutang Usaha	xxx	xxx
Persediaan	xxx	xxx
Beban Dibayar Dimuka	xxx	xxx
Aset Tetap	xxx	xxx
Akumulasi Penyusutan	(xxx)	(xxx)
<b><u>JUMLAHASET</u></b>	<b><u>xxx</u></b>	<b><u>xxx</u></b>
<b>LIABILITAS</b>		

LIABILITAS	xxx	xxx
Utang Usaha	xxx	xxx
Utang Bank	xxx	xxx
<b><u>IUMLAH LIABILITAS</u></b>	<b><u>xxx</u></b>	<b><u>xxx</u></b>
EKUITAS		
Modal	xxx	xxx
Saldo Laba (defisit)	xxx	xxx
<b><u>IUMLAH EKUITAS</u></b>	<b><u>xxx</u></b>	<b><u>xxx</u></b>
<b><u>IUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS</u></b>	<b><u>xxx</u></b>	<b><u>xxx</u></b>

Sumber: www.iaiglobal.or.id

## 2. Laporan Laba Rugi

Laporan yang berisi penghasilan dan beban selama periode tertentu. Berbeda dengan laporan keuangan yang ibarat potret, laporan laba rugi ini ibarat rekaman video yang menggambarkan kejadian terkait pendapatan dan beban selama satu periode, umumnya satu tahun.

Informasi yang disajikan dalam laporan laba rugi: a). Pendapatan. b). Beban keuangan. c). Beban pajak.

**Tabel 2.3**  
**Ilustrasi Laporan Laba Rugi Entitas**

<b>ENTITAS</b>			
<b>LAPORAN LABA RUGI</b>			
<b>UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR DESEMBER 20X8 DAN 20X7</b>			
<b>PENDAPATAN</b>	<b>20X8</b>	<b>20X7</b>	
Pendapatan Usaha	xxx	xxx	
Pendapatan Lain-Lain	xxx	xxx	
<b><u>IUMLAH PENDAPATAN</u></b>	<b><u>xxx</u></b>	<b><u>xxx</u></b>	
<b>BEBAN</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	
Beban Usaha	xxx	xxx	
Beban Lain-Lain	xxx	xxx	
<b><u>IUMLAH BEBAN</u></b>	<b><u>xxx</u></b>	<b><u>xxx</u></b>	
<b>LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	
Beban Pajak Penghasilan	xxx	xxx	
<b><u>LABA (RUGI) SETELAH PAJAK</u></b>	<b><u>xxx</u></b>	<b><u>xxx</u></b>	

Sumber: www.iaiglobal.or.id

### 3. Catatan atas Laporan Keuangan

Berisi atas penjelasan tentang asumsi, prinsip, metode yang digunakan laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi.

Informasi yang disajikan: a). suatu pernyataan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan SAK EMKM; b). ikhtisar kebijakan akuntansi; c). informasi tambahan dan rincian akun tertentu yang menjelaskan transaksi penting dan material sehingga bermanfaat bagi pengguna untuk memahami laporan keuangan.

## Gambar 2.1 Ilustrasi Catatan Atas Laporan Keuangan

ENTITAS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 20x8 DAN 20x7	
<b>1. UMUM</b>	Entitas didirikan di Jakarta berdasarkan akta Nomor xx tanggal 1 Januari 20x7 yang dibuat dihadapan Notaris, S.H., notaris di Jakarta dan mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.xx 2016 tanggal 31 Januari 2016. Entitas bergerak dalam bidang usaha manufaktur. Entitas memenuhi kriteria sebagai entitas mikro, kecil, dan menengah sesuai UU Nomor 20 Tahun 2008. Entitas berdomisili di Jalan xxx, Jakarta Utara.
<b>2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING</b>	
<b>a. Pernyataan Kepatuhan</b>	Laporan keuangan disusun menggunakan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah.
<b>b. Dasar Penyusunan</b>	Dasar penyusunan laporan keuangan adalah biaya historis dan menggunakan asumsi dasar akrual. Mata uang penyajian yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan adalah Rupiah.
<b>c. Piutang usaha</b>	Piutang usaha disajikan sebesar jumlah tagihan.
<b>d. Persediaan</b>	Biaya persediaan bahan baku meliputi biaya pembelian dan biaya angkut pembelian. Biaya konversi meliputi biaya tenaga kerja langsung dan <i>overhead</i> . <i>Overhead</i> tetap dialokasikan ke biaya konversi berdasarkan kapasitas produksi normal. <i>Overhead</i> variabel dialokasikan pada unit produksi berdasarkan penggunaan aktual fasilitas produksi. Entitas menggunakan rumus biaya persediaan rata-rata.
<b>e. Aset Tetap</b>	Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehannya jika aset tersebut dimiliki secara hukum oleh entitas. Aset tetap disusutkan menggunakan metode garis lurus tanpa nilai residu.

Sumber: [www.iaiglobal.or.id](http://www.iaiglobal.or.id)

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Berikut merupakan beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan mengenai pemahaman perpajakan, penerapan akuntansi, dan kepatuhan Wajib Pajak UMKM:

**Tabel 2.4**  
**Penelitian Terdahulu**

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Sumber
1.	Shafira Sri Ningsih, Fitriani Saragih (2020)	Pemahaman Wajib Pajak Pelaku UMKM mengenai Peraturan Pemerintah tentang PP No. 23 Tahun 2018 tentang Ketentuan Pajak UMKM.	1. Sebanyak 75% responden pada Kecamatan Medan Barat mengakui mengenai perubahan tarif pajak dari 1% menjadi 0.5% tetapi tidak mengetahui ketentuan lain yang diatur didalamnya. 2. Pengetahuan WP UMKM mengenai <i>self-assessment system</i> masih rendah, dalam menyelesaikan kewajiban perpajakannya mereka dibantu oleh petugas pajak dan konsultan pajak.	Jurnal
2.	Fitriani Saragih, (2017)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Pada KPP Pratama Medan Kota)	1. Kesadaran WP berpengaruh terhadap kepatuhan WP orang pribadi. 2. Pemahaman peraturan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan WP orang pribadi. 3. Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan WP orang pribadi. 4. Kesadaran, pemahaman peraturan perpajakan, dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan WP orang pribadi.	Jurnal
3.	Muhammad Alfin Amrullah, Saifhul Anuar Syahdan,	Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Pemahaman Akuntansi, dan Pemanfaatan Teknologi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	1. Pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. 2. Pemahaman akuntansi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.	Jurnal

	Gemi Ruwanti, Yunadi (2021)	(Studi Empiris pada UMKM Kabupaten Kotabaru)	3.Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.	
4.	Yohana Masiikah Putri Azmary, Nuramalia Hasanah, Indah Muliasari (2020)	Pengaruh Kecerdasan Spiritual, Penerapan Akuntansi, Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan WPOP UMKM	1.Kecerdasan spiritual tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 2.Penerapan akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 3.Pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.	Jurnal
5.	Elvina Setiawati (2021)	Implementasi SAK EMKM dan Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM di Kota Mataram	Pemahaman akuntansi yang baik melalui pemahaman SAK EMKM dapat memberikan kualitas pencatatan akuntansi yang baik dalam menghasilkan laporan keuangan yang wajar sesuai dengan standar yang berlaku terlebih khusus untuk penyusunan laporan fiskal untuk kepentingan perpajakan. Pelaku UMKM dengan pemahaman akuntansi yang baik mampu menjalankan kewajiban perpajakannya sehingga cenderung memiliki kepatuhan pajak yang lebih tinggi.	Jurnal
6.	Deni Darmawati, Ayu Aulia Oktaviani (2018)	Pengaruh Penerapan Akuntansi UMKM terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKME- Commerce	1.Penerapan akuntansi UMKM berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. 2.Pemahaman perpajakan terbukti sebagai variabel kontrol antarara	Jurnal

			<p>penerapan akuntansi UMKM terhadap kepatuhan wajib pajak.</p> <p>3. Kesadaran wajib pajak tidak terbukti sebagai variabel kontrol antara penerapan akuntansi UMKM terhadap kepatuhan wajib pajak.</p> <p>4. Kemudahan akses terbukti sebagai variabel kontrol antara penerapan akuntansi UMKM terhadap kepatuhan wajib pajak.</p>	
--	--	--	---	--

### 2.3 Kerangka Berpikir Konseptual

Kerangka berpikir konseptual adalah suatu kerangka yang terkonsep tentang bagaimana suatu teori dapat berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka ini disusun berdasarkan tinjauan pustaka dan hasil penelitian yang relevan.

#### **Pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM**

Pemahaman perpajakan merupakan variabel independen yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak UMKM sebagai variabel dependen. Pemahaman perpajakan dapat diukur melalui pengetahuan dan persepsi Wajib Pajak terhadap peraturan pemerintah tentang pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak. Semakin tinggi pemahaman Wajib Pajak tentang peraturan dan ketentuan perpajakan, maka semakin besar kemungkinan Wajib Pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, perpajakan menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

### **Pengaruh Penerapan Akuntansi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM**

Penerapan akuntansi merupakan variabel independen yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak UMKM sebagai variabel dependen. Penerapan akuntansi yang baik dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran Wajib Pajak tentang kewajiban perpajakan mereka. Hal ini karena pencatatan keuangan menggunakan konsep, metode, dan prosedur akuntansi yang dapat membantu Wajib Pajak memahami besarnya kewajiban pajak yang harus ditanggungnya. Hasil penelitian menunjukkan Penerapan akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

### **Pengaruh Pemahaman Perpajakan dan Penerapan Akuntansi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM**

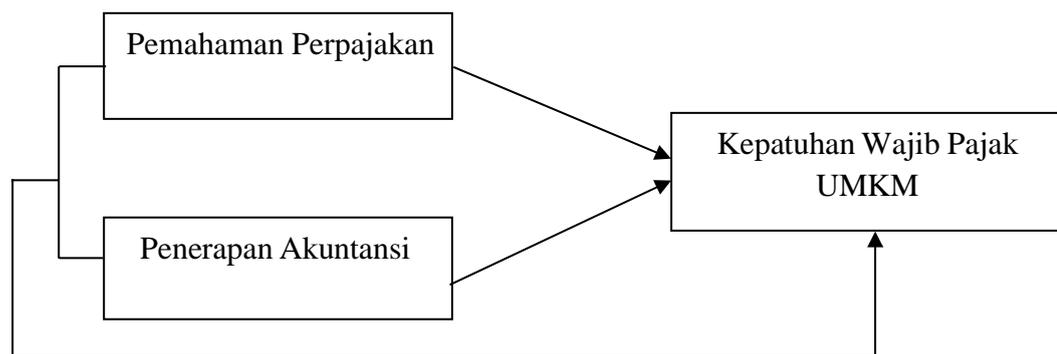
Pemahaman perpajakan yang baik akan memungkinkan UMKM untuk memahami kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi, menghindari kesalahan dalam pelaporan pajak, dan meminimalkan sanksi atau denda. Di sisi lain, penerapan akuntansi yang baik akan memudahkan UMKM dalam memproses, mengolah dan menyajikan informasi keuangan secara akurat dan terpercaya, sehingga UMKM dapat melaporkan pajak dengan tepat dan memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Amrullah et al., 2022) bahwa variabel independen yaitu pemahaman perpajakan dan pemahaman akuntansi secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan Wajib Pajak. Hal tersebut dapat membuktikan bahwa variabel tersebut memberikan dampak yang positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Perlunya memahami tata cara perpajakan yang meliputi hak dan kewajiban Wajib

Pajak hingga cara melaporkan pajak serta fungsi pajak itu sendiri menunjukkan pentingnya pemahaman perpajakan bagi Wajib Pajak. Semakin baik tingkat pemahaman perpajakan yang dimiliki oleh Wajib Pajak akan mempengaruhi kesadaran Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Penerapan akuntansi memiliki peran yang penting sesuai dengan diterapkannya *self-assessment system* dan tarif pajak final 0,5 persen. Wajib Pajak UMKM yang memiliki pemahaman akuntansi yang baik akan memudahkan dalam perhitungan omset dan jumlah pajak yang harus dibayarkan.

Adapun kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Gambar 2.2**  
**Kerangka Konseptual**



## 2.4 Hipotesis

Hipotesis merupakan dugaan sementara terhadap suatu masalah yang masih harus dibuktikan melalui pengujian dan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka hipotesis penelitian ini adalah:

1. Pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM pada KPP Pratama Medan Barat.
2. Penerapan akuntansi berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM pada KPP Pratama Medan Barat.

3. Pemahaman perpajakan dan penerapan akuntansi berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM pada KPP Pratama Medan Barat.

## BAB 3

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif, menggunakan pendekatan asosiatif. Penelitian asosiatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan atau pengaruh antar variabel satu dengan variabel lainnya dengan menggunakan data kuantitatif. Penelitian ini menguji pengaruh pemahaman perpajakan dan penerapan akuntansi terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pada KPP Pratama Medan Barat.

#### 3.2 Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan petunjuk bagaimana suatu variabel diukur atau mempermudah pemahaman dalam membahas suatu penelitian. Dalam penelitian ini digunakan dua variabel independen/bebas (Variabel X), yaitu Pemahaman Perpajakan dan Penerapan Akuntansi, serta satu variabel dependen/terikat (Variabel Y), yaitu Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

**Tabel 3.1**  
**Tabel Definisi Operasional Variabel**

VARIABEL	DEFINISI	INDIKATOR	SKALA
<b>Pemahaman Perpajakan (X1)</b>	Pemahaman perpajakan merupakan pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan dan untuk menerapkannya dalam pembayaran pajak. (Asterina & Septiani, 2019)	1. Pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan. 2. Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan. 3. Pengetahuan mengenai sistem perpajakan. (Asterina & Septiani, 2019)	Likert
<b>Penerapan Akuntansi (X2)</b>	Akuntansi merupakan suatu sistem yang mengolah transaksi menjadi informasi keuangan, sehingga UMKM memperoleh informasi mengenai keuangan bisnisnya, salah satunya informasi	1. Penyusunan laporan keuangan dilakukan secara teratur dan <i>continue</i> . 2. Informasi akuntansi yang dihasilkan secara manual/komputerisasi sesuai SAK EMKM.	Likert



### 3.4 Teknik Pengambilan Sampel

#### 3.4.1 Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas sekelompok orang, kejadian, atau segala sesuatu yang mempunyai karakteristik tertentu. Populasi juga merupakan keseluruhan kumpulan elemen-elemen berkaitan dengan apa yang peneliti harapkan dalam mengambil beberapa kesimpulan. Populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 19.360 Wajib Pajak pelaku UMKM pada KPP Pratama Medan Barat.

#### 3.4.2 Sampel

Sampel merupakan sebagian kecil dari populasi yang menjadi fokus dalam penelitian, atau dapat mewakili beberapa karakteristik yang ada dalam populasi secara keseluruhan. Tujuan penggunaan sampel dalam penelitian adalah untuk mempelajari karakteristik yang dimiliki populasi secara umum. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan peneliti untuk melakukan penelitian pada populasi yang jumlahnya sangat besar, karena keterbatasan waktu, biaya, atau kendala lainnya. Teknik pengambilan sampel (*sampling*) dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* dengan menggunakan rumus *Slovin*, sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2} = \frac{19.360}{1 + 19.360(0,1)^2} = 99,48 = 100$$

Keterangan:

n = Ukuran sampel

N = Ukuran populasi

$e^2$  =Persentase kelonggaran kesalahan ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat ditolerir atau diinginkan sebesar (misalnya 1%, 5%, 10%).

Sehingga sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 100 Wajib Pajak UMKM pada KPP Pratama Medan Barat.

### **3.5 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data-data yang relevan bagi penelitian. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif, dengan menggunakan sumber data sekunder yaitu dengan teknik pengumpulan data dokumentasi, dan menggunakan sumber data primer dengan teknik pengumpulan data kuesioner.

1. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data dan mencari data-data objek penelitian yang telah diperoleh di bagian pengelolaan data dan informasi KPP Pratama Medan Barat berupa data tentang jumlah Wajib Pajak UMKM yang terdaftar, jumlah wajib pajak yang melapor SPT, dan realisasi penerimaan pajak UMKM selama periode 2018 sampai dengan 2022.
2. Kuesioner, yaitu dengan memberikan pertanyaan tertulis kepada responden wajib pajak mengenai pemahaman para pelaku UMKM tentang pemberlakuan pajak UMKM dan penerapan akuntansi dalam meningkatkan kepatuhan UMKM dalam membayar pajaknya.

Dalam mengukur pendapat responden digunakan Skala Likert 5 angka yaitu dimulai angka 5 untuk pendapat Sangat Setuju (SS), angka 4 untuk pendapat Setuju

(S), angka 3 untuk pendapat Netral (N), angka 2 untuk pendapat Tidak Setuju (TS) dan angka 1 untuk Sangat Tidak Setuju (STS), perincian sebagai berikut:

**Tabel 3.2**  
**Skor Skala Likert**

URAIAN	SKOR
Sangat Setuju (SS)	5
Setuju (S)	4
Netral (N)	3
Tidak Setuju (TS)	2
Sangat Tidak Setuju (STS)	1

### **3.6. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data merupakan suatu metode atau cara untuk mengolah dan memproses data menjadi sebuah hasil informasi baru yang valid sehingga bermanfaat untuk menyelesaikan masalah dengan topik yang sama.

#### **3.6.1 Analisis Statistik Deskriptif**

Statistik deskriptif merupakan proses transformasi data penelitian dalam bentuk tabulasi sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan. Tabulasi menyajikan ringkasan, pengaturan, atau penyusunan data dalam bentuk tabel numerik dan grafik. Statistik deskriptif umumnya digunakan untuk memberikan informasi mengenai karakteristik variabel penelitian yang utama dan data demografi.

#### **3.6.2 Uji Kualitas Data**

##### **3.6.2.1 Uji Validitas**

Uji validitas merupakan uji yang berfungsi untuk melihat apakah suatu alat ukur tersebut valid atau tidak valid. Alat ukur yang dimaksud disini merupakan pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid

jika pertanyaan tersebut pada kuesioner dapat mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh kuesioner.

Uji validitas ini dilakukan menggunakan program SPSS, dengan kriteria sebagai berikut:

- a.  $R_{hitung} > r_{tabel}$  (pada taraf  $\alpha = 5\%$ ), maka dapat dikatakan item kuesioner tersebut valid.
- b.  $R_{hitung} < r_{tabel}$  (pada taraf  $\alpha = 5\%$ ), maka dapat dikatakan item kuesioner tersebut tidak valid.

### **3.6.2.2 Uji Reliabilitas**

Uji reliabilitas merupakan alat ukur untuk menunjukkan adanya konsistensi dan stabilitas pada suatu nilai skala pengukuran tertentu yang berkonsentrasi pada masalah akurasi pengukuran dan hasilnya. Kuesioner dinyatakan reliabel apabila jawaban seseorang terhadap pernyataan kuesioner konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Analisis ini menggunakan metode Cronbach's Alpha. Pengujian dikatakan reliabel apabila nilai Cronbach's Alpha mempunyai nilai  $\geq 0,6$ .

### **3.6.3 Uji Asumsi Klasik**

#### **3.6.3.1 Uji Normalitas**

Uji Normalitas bertujuan untuk mengetahui distribusi data dalam variabel yang akan digunakan dalam penelitian. Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah data yang diambil berasal dari populasi yang terdistribusi normal atau tidak.

Uji normalitas dilakukan menggunakan program SPSS, dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Jika nilai uji dalam penelitian ini memiliki probabilitas lebih dari sama dengan signifikansi 5% ( $> 0,05$ ) maka hipotesis tersebut diterima dan memiliki daya yang berdistribusi secara normal.
- b. Jika nilai uji memiliki probabilitas kurang dari signifikansi 5% ( $< 0,05$ ) maka hipotesis tersebut ditolak dan memiliki data tidak berdistribusi secara normal.

### **3.6.3.2 Uji Multikolinearitas**

Uji multikolinearitas diperlukan untuk mengetahui ada atau tidaknya variabel independen yang memiliki kemiripan antar variabel independen dalam suatu model. Kemiripan atau variabel independen akan mengakibatkan korelasi yang sangat kuat. Selain itu, uji ini juga untuk menghindari kebiasaan dalam proses pengambilan keputusan mengenai pengaruh pada uji persial masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen.

Uji multikolinearitas ini menggunakan bantuan program SPSS, dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Jika nilai tolerance  $> 0,10$  maka tidak terjadi multikolinearitas, sebaliknya jika nilai tolerance  $< 0,10$  maka terjadi multikolinearitas; atau
- b. Jika nilai VIF  $< 10,00$  maka tidak terjadi multikolinearitas, sebaliknya jika nilai VIF  $> 10,00$  maka terjadi multikolinearitas.

### **3.6.3.3 Uji Heteroskedastisitas**

Heteroskedastisitas menunjukkan bahwa varians variabel tidak sama untuk semua pengamatan ke pengamatan atau observasi lain. Jika varians dari residu satu pengamatan ke pengamatan lain tetap maka terjadi homokedastisitas. Model regresi

yang baik yaitu tidak terjadi heteroskedastitas yaitu dengan melihat scatterplot. Jika di dalam scatterplot titik-titik menyebar secara acak, baik dibagian diatas maupun dibawah diangka 0 (nol) pada sumbu vertikal atau sumbu Y maka dapat menunjukkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

### 3.6.4 Analisis Regresi Linear Berganda

Pada dasarnya, regresi bertujuan untuk menguji pengaruh antara variabel satu dengan variabel lain. Dalam penelitian ini, digunakan analisis regresi linear berganda menggunakan program SPSS, analisis regresi linear berganda digunakan dikarenakan pada penelitian ini terdapat satu variabel dependen dan lebih dari satu variabel independen. Secara umum formulasi dari regresi berganda dapat ditulis sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Keterangan:

Y	=	Wajib pajak UMKM
a	=	Konstanta
b <sub>1</sub> , b <sub>2</sub>	=	Koefisien regresi masing-masing variabel
X <sub>1</sub>	=	Pemahaman perpajakan
X <sub>2</sub>	=	Penerapan akuntansi
e	=	Error

### 3.6.5 Uji Hipotesis

#### 3.6.5.1 Uji Parsial (Uji t)

Uji t dimaksudkan untuk melihat signifikansi dari pengaruh variabel independen secara individual terhadap variabel dependen dengan menganggap variabel lain bersifat konstan.

Uji pasal (uji t) dilakukan menggunakan program SPSS, berdasarkan nilai signifikansi, dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Apabila nilai signifikansi ( $\text{sig}$ ) > probabilitas 0,05 (5%), maka suatu variabel independen (X) berpengaruh terhadap variabel dependen (Y) atau hipotesis diterima.
- b. Apabila nilai signifikansi ( $\text{sig}$ ) > probabilitas 0,05 (5%), maka tidak ada pengaruh suatu variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y) atau hipotesis ditolak.

### **3.6.5.2 Uji Simultan (Uji F)**

Uji F digunakan menguji ada tidaknya pengaruh variabel-variabel independen dengan variabel dependen secara simultan.

Uji simultan (uji f) dilakukan menggunakan program SPSS, berdasarkan nilai signifikansi, dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Apabila nilai signifikansi ( $\text{sig}$ ) < 0,05, maka variabel independen 1 (X1) dan variabel independen (X2) secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen (Y) atau hipotesis diterima.
- b. Apabila nilai signifikansi ( $\text{sig}$ ) > 0,05, maka variabel independen 1 (X1) dan variabel independen (X2) secara simultan tidak berpengaruh terhadap variabel dependen (Y) atau hipotesis ditolak.

### 3.6.5.3 Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) digunakan untuk melihat seberapa besar kontribusi pengaruh yang diberikan variabel independen (X) secara simultan terhadap variabel dependen (Y). Syarat untuk melihat nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) adalah hasil uji F bernilai signifikan atau ada pengaruh secara simultan variabel independen 1 (X1) dan variabel independen 2 (X2) terhadap variabel dependen (Y), jika tidak maka nilai koefisien determinasi tidak dapat digunakan untuk melihat kontribusi pengaruh masing-masing variabel independen.

Nilai koefisien determinasi yaitu antara 0 dan 1. Jika nilainya mendekati 1, maka variabel independen tersebut memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. Sebaliknya jika nilainya semakin kecil, maka variabel independen cukup terbatas dalam menjelaskan variabel dependen.

## BAB 4

### PEMBAHASAN

#### 4.1 Deskripsi Data

##### 4.1.1 Deskripsi Hasil Penelitian

Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh melalui kuesioner yang dibagikan kepada responden, dengan total 35 pertanyaan diberikan yang terdiri dari 7 pertanyaan untuk variabel X1 (Pemahaman Perpajakan), 17 pertanyaan untuk variabel X2 (Penerapan Akuntansi), dan 11 pertanyaan untuk variabel Y (Kepatuhan Wajib Pajak UMKM). Dalam pengukurannya peneliti menggunakan skala likert 5 poin dimulai dari Sangat Tidak Setuju yang diberikan nilai 1 poin hingga Sangat Setuju diberikan nilai 5 poin.

Populasi pada penelitian ini adalah sebanyak 19.360 Wajib Pajak pelaku UMKM pada KPP Pratama Medan Barat. Sehingga sampel yang digunakan dalam penelitian ini ada 100 Wajib Pajak yang diambil berdasarkan Teknik *purposive sampling* dengan rumus slovin. Hasil tingkat pengembalian kuesioner oleh responden disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 4.1**  
**Tingkat Pengembalian Kuesioner**

KETERANGAN	JUMLAH	PERSENTASE
Kuesioner yang disebar	100	100%
Kuesioner yang kembali	100	100%

Berdasarkan tabel 4.1 menunjukkan bahwa data kuesioner yang disebar sebanyak 100 wajib pajak pelaku UMKM (100%). Jumlah kuesioner yang kembali

sebanyak 100 kuesioner (100%), dengan demikian *rate* responden lebih dari 50% sehingga penelitian ini dapat dianalisis lebih lanjut.

## 4.2 Deskripsi Karakteristik Responden

Kriteria yang dimiliki oleh para responden umumnya dapat mengakibatkan variasi dalam perilaku yang terlihat dalam suatu bidang pekerjaan, sehingga sering kali terdapat perbedaan dalam aktivitas yang dilakukan oleh masing-masing individu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik responden UMKM adalah sebagai berikut:

### 4.2.1 Berdasarkan Jenis Kelamin

**Tabel 4.2**  
**Karakteristik Responden berdasarkan Jenis Kelamin**

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
Laki-Laki	52	52%
Perempuan	48	48%
TOTAL	100	100%

Sumber: Penelitian 2023 (Data Diolah Penulis)

Tabel 4.2 menunjukkan persentase jenis kelamin responden. Dari total responden sebanyak 100 orang, didominasi oleh laki-laki sebanyak 52 orang (52%), dan sisanya adalah perempuan sebanyak 48 orang (48%).

### 4.2.2 Berdasarkan Usia

**Tabel 4.3**  
**Karakteristik Responden berdasarkan Usia**

Usia	Jumlah	Persentase
<20 tahun	0	0%
20 – 29 tahun	37	37%
30 – 39 tahun	33	33%

40 – 49 tahun	21	21%
>50 tahun	9	9%
TOTAL	100	100%

Sumber: Penelitian 2023 (Data Diolah Penulis)

Tabel 4.3 menunjukkan persentase usia responden dalam berbagai kelompok usia. Dari total responden sebanyak 100 orang, tidak ditemukan responden yang berusia kurang dari 20 tahun. Responden ini didominasi oleh responden yang berusia 20 – 29 tahun yaitu sebanyak 37 orang (37%), lalu diikuti oleh responden yang berusia 30-39 tahun yaitu sebanyak 33 orang (33%), kemudian responden yang berusia 40 – 49 tahun ada sebanyak 21 orang (21%), dan responden yang memiliki usia paling sedikit adalah responden yang berusia >50 tahun yaitu sebanyak 9 orang (9%).

#### 4.2.3 Berdasarkan Pendidikan Terakhir

**Tabel 4.4**  
**Karakteristik Responden berdasarkan Tingkat Pendidikan Terakhir**

Pendidikan Terakhir	Jumlah	Persentase
SD/SMP	8	8%
SMA/SMK Sederajat	49	49%
Diploma	10	10%
Sarjana	32	32%
Lainnya	1	1%
TOTAL	100	100%

Sumber: Penelitian 2023 (Data Diolah Penulis)

Tabel 4.4 menunjukkan persentase pendidikan terakhir responden penelitian ini. Dari total responden sebanyak 100 orang, tingkat pendidikan terakhir didominasi oleh SMA/SMK sederajat sebanyak 49 orang (49%), responden yang memiliki tingkat pendidikan terakhir sarjana sebanyak 32 orang (32%), %),

responden memiliki pendidikan terakhir diploma sebanyak 10 orang (10%), responden memiliki pendidikan terakhir SD/SMP sebanyak 8 orang (8%), dan yang terakhir responden yang memiliki tingkat Pendidikan selain SMA/SMK sederajat, sarjana, diploma, SD/SMP ada sebanyak 1 orang (1%).

#### 4.2.4 Berdasarkan Lama Usaha UMKM

**Tabel 4.5**  
**Karakteristik Responden berdasarkan Lama Usaha UMKM**

Lama Usaha UMKM	Jumlah	Persentase
1 – 5 tahun	44	44%
6 – 10 tahun	36	36%
11- 15 tahun	9	9%
>15 tahun	11	11%
TOTAL	100	100%

Sumber: Penelitian 2023 (Data Diolah Penulis)

Tabel 4.5 menunjukkan persentase lama usaha UMKM yang dimiliki responden dalam penelitian ini. Dari total responden sebanyak 100 orang, didominasi oleh responden yang telah memiliki UMKM selama 1-5 tahun yaitu sebanyak 44 orang (44%), lalu diikuti oleh responden telah memiliki UMKM selama 6-10 tahun yaitu sebanyak 36 orang (36%), responden telah memiliki UMKM lebih dari 15 tahun sebanyak 11 orang (11%), dan yang paling sedikit adalah responden yang telah memiliki UMKM selama 11-15 tahun yaitu sebanyak 9 orang (9%).

## 4.2.5 Berdasarkan Jenis Usaha UMKM

**Tabel 4.6**  
**Karakteristik Responden berdasarkan Jenis Usaha UMKM**

Jenis Usaha	Jumlah	Persentase
Dagang	89	89%
Jasa	11	11%
Manufaktur	0	0%
Total	100	100%

Sumber: Penelitian 2023 (Data Diolah Penulis)

Tabel 4.6 menunjukkan jenis usaha UMKM yang dimiliki responden dalam penelitian ini. Dapat diketahui bahwa mayoritas responden memiliki jenis usaha dagang yaitu sebanyak 89 orang (89%), responden yang memiliki jenis usaha jasa sebanyak sebanyak 11 orang (11%), serta tidak ditemukan responden yang memiliki jenis usaha manufaktur.

## 4.3 Analisis Data Penelitian

Data yang telah terkumpul akan dianalisis lebih lanjut melalui proses pengujian terhadap data dengan menggunakan metode-metode sebagai berikut:

### 4.3.1 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini mencakup pengukuran rata-rata (Mean), nilai terendah (Minimum), nilai tertinggi (Maximum), dan standar deviasi (Std. Deviation/SD). Mean menunjukkan nilai rata-rata atau nilai tengah pada data ini. Minimum menunjukkan nilai terendah dalam sebuah kelompok data. Maximum menunjukkan nilai tertinggi dalam sebuah kelompok data, dan standar deviasi menunjukkan sebaran data berdasarkan nilai rata-ratanya.

**Tabel 4.7**  
**Hasil Uji Statistik Deskriptif**

<b>Descriptive Statistics</b>					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pemahaman Perpajakan	100	7	35	24.13	6.561
Penerapan Akuntansi	100	28	85	63.18	13.305
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	100	11	55	36.59	12.325
Valid N (listwise)	100				

### 1. Pemahaman Perpajakan (X1)

Berikut pedoman kategorisasi rata-rata skor penilaian responden pemahaman perpajakan (X1):

$$P = \frac{\text{Rentang}}{\text{Banyak Kelas}}$$

$$P = \frac{28}{5} = 5,6$$

Keterangan:

P = Panjang Kelas Interval

Rentang = Nilai skor tertinggi (35) – nilai skor terendah (7) = 28

Banyak Kelas Interval= 5

**Tabel 4.8**  
**Pedoman Kategorisasi Rata-Rata Skor Penilaian Responden Variabel X1**

Rentang Nilai Rata-Rata Skor	Kategori
7 – 12.6	Sangat Tidak Setuju
12.61 – 18.2	Tidak Setuju
18.21 – 23.8	Netral
23.81 – 29.4	Setuju
29.41 – 35	Sangat Setuju

Kuesioner pemahaman perpajakan terdiri atas 7 butir pertanyaan, setiap butir pertanyaan diberikan nilai skor 1-5, dimulai dari skor 1 (sangat tidak setuju), skor 2 (tidak setuju), skor 3 (netral), skor 4 (setuju) dan skor 5 (sangat setuju). Dari tabel data hasil uji statistik deskriptif diketahui bahwa jumlah skor minimum yang diperoleh sebesar 7 poin, artinya ada responden memberikan nilai masing-masing 1 poin pada setiap butir soal pertanyaan tentang pemahaman perpajakannya. Dan diketahui bahwa jumlah skor maksimum yang diperoleh sebesar 35 poin, artinya seorang responden memberikan nilai maksimal masing-masing 5 poin pada setiap butir soal pertanyaan tentang pemahaman perpajakannya.

Diketahui bahwa rata-rata total nilai poin yang diberikan oleh responden adalah sebesar 24.13. Hal ini menunjukkan bahwa responden mayoritas setuju (kategori ke-4) dengan pernyataan yang diberikan pada kuesioner tersebut.

## 2. Penerapan Akuntansi (X2)

Berikut pedoman kategorisasi rata-rata skor penilaian responden penerapan akuntansi (X2):

$$P = \frac{\textit{Rentang}}{\textit{Banyak Kelas}}$$

$$P = \frac{68}{5} = 13,6$$

Keterangan:

P = Panjang Kelas Interval

Rentang = Nilai skor tertinggi (85) – nilai skor terendah (17) = 68

Banyak Kelas Interval= 5

**Tabel 4.9**  
**Pedoman Kategorisasi Rata-Rata Skor Penilaian Responden Variabel X2**

Rentang Nilai Rata-Rata Skor	Kategori
17 – 30.6	Sangat Tidak Setuju
30.61 – 44.2	Tidak Setuju
44.21 – 57.8	Netral
57.81 – 71.4	Setuju
71.41 – 85	Sangat Setuju

Kuesioner penerapan akuntansi terdiri atas 17 butir pertanyaan, setiap butir pertanyaan diberikan nilai skor 1-5, dimulai dari skor 1 (sangat tidak setuju), skor 2 (tidak setuju), skor 3 (netral), skor 4 (setuju) dan skor 5 (sangat setuju). Dari tabel data hasil uji statistik deskriptif diketahui bahwa jumlah skor minimum yang diperoleh sebesar 28 poin. Dan diketahui bahwa jumlah skor maksimum yang diperoleh sebesar 85 poin, artinya seorang responden memberikan nilai maksimal masing-masing 5 poin pada setiap butir soal pertanyaan tentang penerapan akuntansi pada UMKMnya.

Diketahui bahwa rata-rata total nilai poin yang diberikan oleh responden adalah sebesar 63.18. Hal ini menunjukkan bahwa responden mayoritas setuju (kategori ke-4) dengan pernyataan yang diberikan pada kuesioner tersebut.

### 3. Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)

Berikut pedoman kategorisasi rata-rata skor penilaian responden kepatuhan wajib pajak UMKM (Y):

$$P = \frac{\text{Rentang}}{\text{Banyak Kelas}}$$

$$P = \frac{44}{5} = 8.8$$

Keterangan:

P = Panjang Kelas Interval

Rentang = Nilai skor tertinggi (55) – nilai skor terendah (11) = 44

Banyak Kelas Interval= 5

**Tabel 4.10**  
**Pedoman Kategorisasi Rata-Rata Skor Penilaian Responden Variabel Y**

Rentang Nilai Rata-Rata Skor	Kategori
11 – 19.8	Sangat Tidak Setuju/Sangat Tidak Patuh
19.81 – 28.6	Tidak Setuju/Tidak Patuh
28.61 – 37.4	Netral
37.41 – 46.2	Setuju/Paham
46.21 – 55	Sangat Setuju/Sangat Paham

Kuesioner pemahaman perpajakan terdiri atas 11 butir pertanyaan, setiap butir pertanyaan diberikan nilai skor 1-5, dimulai dari skor 1 (sangat tidak setuju), skor 2 (tidak setuju), skor 3 (netral), skor 4 (setuju) dan skor 5 (sangat setuju). Dari tabel data hasil uji statistik deskriptif diketahui bahwa jumlah skor minimum yang diperoleh sebesar 11 poin, artinya seorang responden memberikan nilai minimum masing-masing 1 poin pada setiap butir soal pertanyaan tentang kepatuhan perpajakan UMKMnya. Dan diketahui bahwa jumlah skor maksimum yang diperoleh sebesar 55 poin, artinya seorang responden memberikan nilai maksimal masing-masing 5 poin pada setiap butir soal pertanyaan tentang kepatuhan perpajakan UMKMnya.

Diketahui bahwa rata-rata total nilai poin yang diberikan oleh responden adalah sebesar 36.59. Hal ini menunjukkan bahwa responden mayoritas netral (kategori ke-3) dengan pernyataan yang diberikan pada kuesioner tersebut.

### 4.3.2 Uji Kualitas Data

#### 4.3.2.1. Uji Validitas

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui kesesuaian/kevalidan kuesioner yang digunakan oleh peneliti dalam mengukur dan memperoleh data penelitian dari responden. Pengujian validitas dilakukan menggunakan SPSS 26 dengan rumus *Correlate, Bivariate Correlations*. Pengujian validitas dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung dengan r tabel. Dimana, jika nilai r hitung > r tabel maka pertanyaan kuesioner tersebut dinyatakan valid. Berikut hasil uji validitas pada setiap variabel penelitian:

#### a. Pemahaman Perpajakan (X1)

**Tabel 4.11**  
**Hasil Uji Validitas Variabel Pemahaman Perpajakan (X1)**

Nomor Pertanyaan	R tabel	R hitung	Keterangan
1	0.195	0.774	Valid
2	0.195	0.838	Valid
3	0.195	0.818	Valid
4	0.195	0.728	Valid
5	0.195	0.804	Valid
6	0.195	0.794	Valid
7	0.195	0.788	Valid

Sumber: Output SPSS 26 Data Diolah Penulis 2023

Tabel 4.11 menunjukkan bahwa nilai  $r$  hitung setiap butir pertanyaan pada variabel pemahaman perpajakan ( $X_1$ ) memiliki nilai lebih besar dari  $r$  tabel (0.195). Sehingga setiap instrumen dapat dinyatakan valid.

#### b. Penerapan Akuntansi ( $X_2$ )

**Tabel 4.12**  
**Hasil Uji Validitas Variabel Penerapan Akuntansi ( $X_2$ )**

Nomor Pertanyaan	R tabel	R hitung	Keterangan
1	0.195	0.519	Valid
2	0.195	0.522	Valid
3	0.195	0.737	Valid
4	0.195	0.750	Valid
5	0.195	0.761	Valid
6	0.195	0.818	Valid
7	0.195	0.784	Valid
8	0.195	0.801	Valid
9	0.195	0.766	Valid
10	0.195	0.588	Valid
11	0.195	0.675	Valid
12	0.195	0.621	Valid
13	0.195	0.542	Valid
14	0.195	0.615	Valid
15	0.195	0.581	Valid
16	0.195	0.682	Valid
17	0.195	0.638	Valid

Sumber: Output SPSS 26 Data Diolah Penulis 2023

Tabel 4.12 menunjukkan bahwa nilai r hitung setiap setiap butir pertanyaan pada variabel penerapan akuntansi (X2) memiliki nilai lebih besar dari r tabel (0.195). Sehingga setiap instrumen dapat dinyatakan valid.

### c. Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)

**Tabel 4.13**  
**Hasil Uji Validitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)**

Nomor Pertanyaan	R tabel	R hitung	Keterangan
1	0.195	0.727	Valid
2	0.195	0.695	Valid
3	0.195	0.903	Valid
4	0.195	0.872	Valid
5	0.195	0.923	Valid
6	0.195	0.864	Valid
7	0.195	0.825	Valid
8	0.195	0.876	Valid
9	0.195	0.904	Valid
10	0.195	0.932	Valid
11	0.195	0.856	Valid

Sumber: Output SPSS 26 Data Diolah Penulis 2023

Tabel 4.13 menunjukkan bahwa nilai r hitung setiap setiap butir pertanyaan pada variabel kepatuhan wajib pajak UMKM (Y) memiliki nilai lebih besar dari r tabel (0.195). Sehingga setiap instrumen dapat dinyatakan valid.

#### 4.3.2.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengevaluasi apakah kuesioner menunjukkan konsistensi saat pengukuran menggunakan kuesioner tersebut dilakukan secara berulang. Pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai *cronbarch's alpha*, jika nilai *Cronbarch's Alpha* > 0.60, maka instrumen tersebut

dapat dikatakan reliabel (handal). Berikut merupakan hasil uji reliabilitas pada setiap variabel:

**Tabel 4.14**  
**Hasil Uji Reliabilitas Variabel Penelitian**

No.	Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
1.	Pemahaman Perpajakan (X1)	0.901	Reliabel
2.	Penerapan Akuntansi (X2)	0.923	Reliabel
3.	Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)	0.963	Reliabel

Sumber: Output SPSS 26

Tabel 4.14 menunjukkan bahwa nilai *cronbarch's alpha* setiap variabel memiliki nilai lebih dari 0.60. Sehingga setiap instrumen dapat dikatakan reliabel (handal).

### 4.3.3 Uji Asumsi Klasik

#### 4.3.3.1 Uji Normalitas

Hasil uji normalitas terhadap data variabel pemahaman perpajakan, penerapan akuntansi, dan kepatuhan wajib pajak UMKM dapat dilihat hasilnya sebagai berikut:

**Tabel 4.15**  
**Uji Normalitas *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test***

		Unstandardized
		Residual
N		100
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	7.43685828
Most Extreme Differences	Absolute	.053
	Positive	.046

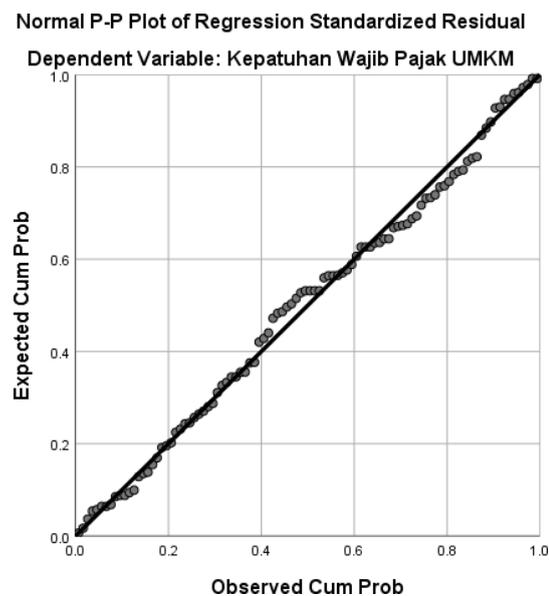
	Negative	-.053
Test Statistic		.053
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 <sup>c,d</sup>

- Test distribution is Normal.
- Calculated from data.
- Lilliefors Significance Correction.
- This is a lower bound of the true significance.

Sumber: Output SPSS 26

Berdasarkan tabel 4.15 hasil uji normalitas *Kolmogorov Smirnov*, data dapat dikatakan berdistribusi normal jika nilai signifikansinya  $> 0.05$  dan data tidak berdistribusi dengan normal jika nilai signifikansinya  $< 0.05$ . Sehingga dapat diketahui dari tabel 4.15 nilai signifikansi  $0.200 > 0.05$ . Maka dapat disimpulkan bahwa nilai residual berdistribusi normal.

Analisis lebih lanjut menggunakan *Normal Probability Plot of Regression Standardized Residual (P-P Plot)* untuk melihat apakah data berdistribusi normal atau tidak. Hasil pengujian normalitas P-P Plot dapat dilihat pada gambar 4.1 :



**Gambar 4.1**  
Uji Normalitas *Probability Plot (P-P Plot)*

Pengujian normalitas data dilaksanakan dengan mengamati sebaran titik-titik data pada garis diagonal dalam grafik. Dasar penarikan kesimpulan didasarkan pada apakah titik-titik tersebut menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis tersebut. Jika demikian, maka asumsi normalitas model regresi terpenuhi.

Berdasarkan gambar 4.1 uji normalitas *Probability Plot (P-P Plot)* terlihat bahwa titik-titik menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah diagonal, hal ini menunjukkan bahwa data penelitian ini berdistribusi secara normal.

#### 4.3.3.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk menguji apakah terdapat korelasi antar variabel bebas (independen) dalam model regresi. Pada model regresi yang baik, tidak terdapat korelasi yang signifikan antara variabel bebas (independen), karena korelasi yang kuat di antara variabel-variabel bebas (independen) akan mengganggu hubungan antara variabel bebas (independen) dengan variabel terikatnya (dependen). Dasar pengambilan keputusan dapat dilihat dari nilai tolerance atau VIF. Jika nilai tolerance  $> 0.10$  atau nilai VIF  $< 10.00$  maka dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas.

**Tabel 4.16**  
**Hasil Uji Multikolinearitas**

Model		Sig.	Collinearity Statistics	
			Tolerance	VIF
1	(Constant)	.010		
	Pemahaman Perpajakan	.000	.583	1.714
	Penerapan Akuntansi	.000	.583	1.714

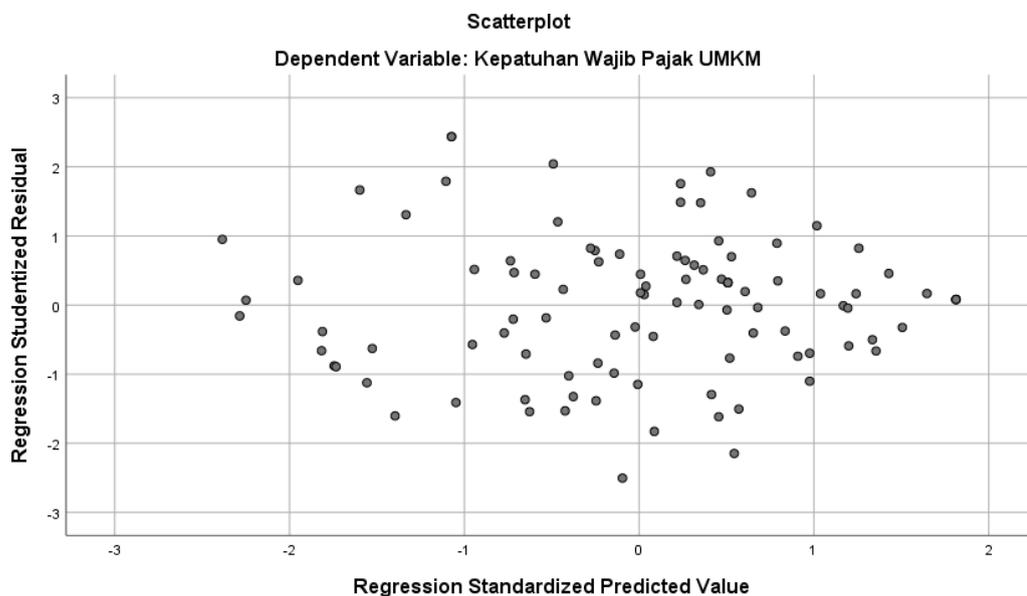
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Dari tabel 4.16 Menunjukkan hasil uji multikolinearitas. Berdasarkan nilai tolerance  $0.583 > 0.10$ , maka dapat disimpulkan dalam data ini tidak terjadi

multikolinearitas. Atau, berdasarkan nilai VIF  $1.714 < 10.00$  maka dalam data ini tidak terjadi multikolinearitas.

#### 4.3.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah ada ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas, yang dapat dilihat menggunakan grafik scatterplot. Hasil uji heteroskedastisitas menggunakan grafik scatterplot dapat dilihat pada gambar dibawah:



**Gambar 4.2**  
**Hasil Uji Heteroskedastisitas**

Berdasarkan gambar 4.2 Hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan titik-titik data menyebar diatas, dibawah atau disekitar angka 0. Titik-titik data juga menyebar secara acak, tidak membentuk pola dan tidak mengumpul hanya diatas atau dibawah saja. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas.

#### 4.3.4 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda dalam penelitian ini dilakukan menggunakan dua variabel independen yang terdiri dari variabel pemahaman perpajakan, variabel penerapan akuntansi dan satu variabel dependen yaitu variabel kepatuhan wajib pajak UMKM. Berikut ini hasil pengujian data dengan menggunakan regresi linear berganda:

**Tabel 4.17**  
**Uji Regresi Linear Berganda**

Model		Coefficients <sup>a</sup>				t	Sig.
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients			
		B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	-9.744	3.713			-2.624	.010
	Pemahaman Perpajakan	.715	.151	.381		4.746	.000
	Penerapan Akuntansi	.460	.074	.497		6.194	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Persamaan regresi linear bergandanya adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

$$Y = -9.774 + 0.715X_1 + 0.460X_2 + e$$

Berikut merupakan penjelasan dari persamaan regresi linear berganda diatas:

1. Konstanta bernilai -9.744, hal ini menunjukkan bahwa apabila nilai variabel pemahaman perpajakan dan variabel penerapan akuntansi dianggap 0, maka nilai kepatuhan wajib pajak UMKM sebesar -9.774.
2. Koefisien variabel pemahaman perpajakan sebesar 0.715, artinya apabila terjadi kenaikan nilai variabel pemahaman perpajakan sebesar 1 poin maka akan menaikkan tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM sebesar 0.715 atau sebesar 71.5%.

3. Koefisien variabel penerapan akuntansi sebesar 0.460, artinya apabila terjadi kenaikan nilai variabel penerapan akuntansi sebesar 1 poin maka akan menaikkan tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM sebesar 0.460 atau sebesar 46%.

### 4.3.5 Uji Hipotesis

#### 4.3.5.1 Uji Parsial (Uji t)

Uji parsial (uji t) bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh parsial (sendiri) yang diberikan variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y). Berikut merupakan hasil uji parsial (uji t) dalam penelitian ini:

**Tabel 4.18**  
**Hasil Uji Parsial (Uji t)**

Model		Coefficients <sup>a</sup>				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-9.744	3.713		-2.624	.010
	Pemahaman Perpajakan	.715	.151	.381	4.746	.000
	Penerapan Akuntansi	.460	.074	.497	6.194	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Berdasarkan tabel 4.18 hasil uji parsial (uji t) dapat disimpulkan:

#### 1. Pengaruh Pemahaman Perpajakan

Berdasarkan pengujian secara parsial pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dengan menggunakan program SPSS versi 26 diperoleh nilai signifikansi sebesar 0. Karena nilai signifikansi  $0 < 0,05$  maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

## 2. Pengaruh Penerapan Akuntansi

Berdasarkan pengujian secara parsial pengaruh penerapan akuntansi terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dengan menggunakan program SPSS versi 26 diperoleh nilai signifikansi sebesar 0. Karena nilai signifikansi  $0 < 0,05$  maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan akuntansi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

### 4.3.5.2 Uji Simultan (Uji F)

Uji simultan (Uji F) bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh simultan (bersama-sama) yang diberikan variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y). Berikut merupakan hasil uji simultan (Uji F) dalam penelitian ini:

**Tabel 4.19**  
**Hasil Uji Simultan (Uji F)**

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	9562.811	2	4781.405	84.706	.000 <sup>b</sup>
	Residual	5475.379	97	56.447		
	Total	15038.190	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

b. Predictors: (Constant), Penerapan Akuntansi, Pemahaman Perpajakan

Berdasarkan pengujian secara simultan pengaruh pemahaman perpajakan dan penerapan akuntansi terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dengan menggunakan program SPSS versi 26 diperoleh nilai signifikansi sebesar 0. Karena nilai signifikansi  $0 < 0,05$  maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan dan penerapan akuntansi berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

### 4.3.6 Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Uji koefisien determinasi bertujuan untuk mengetahui berapa persen pengaruh yang diberikan variabel independent (X) secara simultan terhadap variabel dependen (Y). Berikut merupakan hasil uji koefisien determinasi ( $R^2$ ) dalam penelitian ini:

**Tabel 4.20**  
**Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.797 <sup>a</sup>	.636	.628	7.513

a. Predictors: (Constant), Penerapan Akuntansi, Pemahaman Perpajakan

Dari tabel 4.20 diketahui bahwa nilai R square sebesar 0.636, hal ini mengandung arti bahwa pengaruh variabel pemahaman perpajakan (X1) dan penerapan akuntansi (X2) secara simultan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak UMKM (Y) adalah sebesar 63.6% sedangkan 36.4% nya dipengaruhi variabel lain.

## 4.4 Pembahasan Penelitian

### 4.4.1 Pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Berdasarkan hasil perhitungan pengujian hipotesis uji t untuk variabel pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dengan menggunakan program SPSS versi 26 diperoleh nilai signifikansi sebesar 0. Karena nilai signifikansi  $0 < 0,05$  maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima.

Sehingga hasil penelitian ini adalah bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pada KPP Pratama Medan Barat. Hal ini menunjukkan semakin tinggi tingkat pemahaman perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak maka akan semakin tinggi juga kepatuhan wajib pajak tersebut untuk melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak, begitupun sebaliknya semakin kecil pemahaman wajib pajak terhadap perpajakan maka akan semakin kecil pula kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak.

Pemahaman perpajakan merupakan proses dimana wajib pajak mengetahui dan paham mengenai peraturan perpajakan yang ada dan mengimplementasikannya untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Perbedaan tingkat pemahaman dan pengetahuan wajib pajak akan mempengaruhi pandangan wajib pajak terhadap pentingnya mematuhi aturan perpajakan yang ada, tingkat. Serta untuk menghindari kesalahan dalam pelaporan pajak dan untuk menghindari sanksi pajak. Pelaku UMKM pada KPP Pratama Medan Barat sudah mulai memahami tentang fungsi pajak, ketentuan perpajakan, dan sistem perpajakan yang dikenakan untuk usahanya, tetapi belum maksimal dilihat dari rata-rata kategorisasi data yang belum mencapai tingkat sangat setuju.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Palalangan et al., 2019) yang menyatakan bahwa Wajib pajak dengan pemahaman perpajakan yang tinggi cenderung lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, penelitian yang dilakukan (Amrullah et al., 2022) yang menyatakan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, dan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Indrawan & Binekas, 2018) yang menyatakan bahwa pemahaman pajak dan pengetahuan pajak memberikan

pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

#### **4.4.2 Pengaruh Penerapan Akuntansi terhadap Kepatuhan Wajib**

##### **Pajak UMKM**

Berdasarkan hasil perhitungan pengujian hipotesis uji t untuk variabel pengaruh penerapan akuntansi terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dengan menggunakan program SPSS versi 26 diperoleh nilai signifikansi sebesar 0. Karena nilai signifikansi  $0 < 0,05$  maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima. Sehingga hasil penelitian ini adalah penerapan akuntansi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pada KPP Pratama Medan Barat. Hal ini menunjukkan semakin tinggi tingkat penerapan akuntansi yang dilakukan wajib pajak terhadap usahanya maka akan semakin tinggi juga kepatuhan wajib pajak tersebut untuk melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak, begitupun sebaliknya semakin kecil tingkat penerapan akuntansi yang dilakukan wajib pajak terhadap usahanya maka akan semakin kecil pula kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak.

Akuntansi digunakan untuk mengelola dan merekam transaksi keuangan yang terjadi dalam perusahaan, lalu laporan keuangan yang dihasilkan dari akuntansi tersebut menjadi dasar dalam menentukan besarnya kewajiban perpajakan perusahaan. Pelaku UMKM pada KPP Pratama Medan Barat sudah menerapkan pencatatan dan membuat laporan keuangan pada usahanya, namun belum semua yang sudah menerapkan akuntansi menggunakan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (SAK EMKM).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Y. M. Azmary et al., 2020) penerapan akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

#### **4.4.3 Pengaruh Pemahaman Perpajakan dan Penerapan Akuntansi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM**

Berdasarkan hasil perhitungan pengujian hipotesis uji f untuk variabel pengaruh pemahaman perpajakan dan penerapan akuntansi terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dengan menggunakan program SPSS versi 26 diperoleh nilai signifikansi sebesar 0. Karena nilai signifikansi  $0 < 0,05$  maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima. Sehingga hasil penelitian ini adalah pemahaman perpajakan dan penerapan akuntansi berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pada KPP Pratama Medan Barat. Variabel pemahaman perpajakan dan penerapan akuntansi ini bisa mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM sebesar 63.6% yang dibuktikan melalui uji koefisien determinasi dan sisanya bisa dipengaruhi oleh faktor lain seperti sosialisasi perpajakan, tarif pajak, mekanisme pembayaran pajak, kesadaran membayar pajak, sanksi pajak, tingkat kepercayaan pada sistem hukum dan pemerintah, dan sebagainya.

Dengan menerapkan akuntansi yang tepat, UMKM dapat memperoleh berbagai informasi keuangan penting, seperti kinerja perusahaan, posisi keuangan perusahaan, perubahan modal pemilik, informasi perhitungan pajak, serta informasi pemasukan dan pengeluaran kas UMKM. Dengan begitu, penghasilan yang dikenakan pajak dapat diidentifikasi melalui catatan tersebut, dan ini akan membantu wajib pajak dalam proses pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) pajak.

Dengan pemahaman perpajakan yang kuat, akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Pada umumnya, seseorang yang memiliki pendidikan akan memiliki kesadaran dan ketaatan terhadap hak dan kewajibannya tanpa harus diintimidasi oleh sanksi atau hukuman. Wajib pajak yang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan akan secara sukarela mematuhi kewajiban pajaknya. Wajib pajak yang telah memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan akan menghindari sanksi dan kesalahan dalam menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya. Sehingga untuk menghindari kesalahan tersebut wajib pajak perlu informasi mengenai penghasilan usahanya secara akurat yang dapat dihasilkan dengan menerapkan akuntansi sesuai standard yang ada.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Dartini & Jati, 2016), pemahaman akuntansi dan perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penerapan akuntansi yang baik dan benar dapat mempengaruhi pelaporan perpajakan.

## **BAB 5**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan menguji apakah pemahaman perpajakan dan penerapan akuntansi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pada KPP Pratama Medan Barat, baik berpengaruh secara parsial maupun simultan. Data penelitian ini diolah menggunakan software SPSS versi 26. Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan, maka dapat ditarik kesimpulan:

1. Pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pada KPP Pratama Medan Barat. Hal ini menunjukkan bahwa dengan pemahaman yang memadai terhadap ketentuan perpajakan, fungsi pajak, dan sistem perpajakan akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Semakin tinggi pemahaman perpajakan wajib pajak maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil penelitian tingkat pemahaman perpajakan berada dikategori setuju (kategori 4) yang artinya pemahaman perpajakannya belum berada ditingkat yang maksimal, dengan tingkat kepatuhan wajib pajak pada tahun 2022 hanya sebesar 48,57%. Sehingga jika pemahaman perpajakan ditingkatkan maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat juga.
2. Penerapan akuntansi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pada KPP Pratama Medan Barat. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan akuntansi pada UMKM yang baik dengan cara penyusunan laporan

keuangan secara teratur dan penerapan SAK EMKM dalam laporan keuangan perusahaan akan mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Semakin tinggi penerapan akuntansi wajib pajak maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajaknya. Berdasarkan hasil penelitian tingkat penerapan akuntansi pada UMKM berada dikategori setuju (kategori 4) yang artinya penerapan akuntansinya belum berada ditingkat yang maksimal, dengan tingkat kepatuhan wajib pajak pada tahun 2022 hanya sebesar 48,57%. Sehingga jika penerapan akuntansi pada UMKM ditingkatkan maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat juga.

3. Pemahaman perpajakan dan penerapan akuntansi berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Medan Barat sebesar 63.6% berdasarkan nilai koefisien determinasinya. Sedangkan sisanya 36.4% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Semakin tinggi pemahaman perpajakan sekaligus penerapan akuntansi wajib pajak maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajaknya.

## **5.2 Saran**

Berikut beberapa saran yang dapat diberikan peneliti berdasarkan hasil penelitian ini:

1. Bagi wajib pajak UMKM, tingkatkan pemahaman perpajakan dan akuntansi dengan mengikuti pelatihan atau seminar yang diselenggarakan oleh pihak yang berwenang. Hal ini akan membantu UMKM untuk memahami kewajiban perpajakan dan menerapkan akuntansi yang benar.

2. Untuk pihak berwenang, sosialisasikan kewajiban perpajakan dan penerapan akuntansi pada UMKM secara teratur dan menyeluruh. Hal ini dapat dilakukan melalui seminar, pelatihan, atau kampanye yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pihak berwenang.
3. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat menambahkan variabel yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM, karena kemungkinan masih banyak faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

### **5.3 Keterbatasan Penelitian**

Dalam melakukan penelitian, terdapat beberapa keterbatasan yang mungkin akan berdampak pada hasil penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Ada beberapa pemilik UMKM yang sedang tidak ada ditempat, sehingga peneliti harus kembali lagi hari berikutnya atau menitipkan kuesioner kepada karyawannya dan mengambil kembali kuesioner beberapa hari kemudian.
2. Penelitian ini menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data, sehingga hasil kesimpulan yang diambil hanya berdasarkan data yang dikumpulkan melalui kuesioner dan diolah menggunakan SPSS 26.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adiman, S. (2020). Pengaruh Penerapan PP No 23 Tahun 2018 terhadap Peningkatan Kepatuhan Pembayaran Pajak pada Pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah). *Jurnal Perpajakan*, 1(2), 68–82.
- Amrullah, M. A., Syahdan, S. A., & Ruwanti, G. (2022). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Pemahaman Akuntansi, dan Pemanfaatan Teknologi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada UMKM Kabupaten Kotabaru). *Jurnal Manajemen Dan Akuntansi*, 22(2).
- Asterina, F., & Septiani, C. (2019). PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN PAJAK, SANKSI PERPAJAKAN, PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (WPOP). *BALANCE : JURNAL AKUNTANSI DAN BISNIS*, 4(2), 595.  
<https://doi.org/10.32502/jab.v4i2.1986>
- Azmary, Y. M., Hasanah, N., & Muliastari, I. (2020). Pengaruh Kecerdasan Spiritual, Penerapan Akuntansi, Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak WPOP UMKM. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan, Dan Auditing*, 1(1), 133–146.
- Azmary, Y. M. P. (2019). *PENGARUH KECERDASAN SPIRITUAL, PENERAPAN AKUNTANSI UMKM DAN PEMAHAMAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG BERGERAK DI BIDANG UMKM (STUDI PADA PEDAGANG PIK PULO GADUNG, JAKARTA TIMUR)* [Thesis S1]. Universitas Negeri Jakarta.
- Bahri, S. (2020). ANALISI FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN KESADARAN WAJIB PAJAK SEBAGAI VARIABEL INTERVENING. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 20(1), 1–15. <https://doi.org/10.30596/jrab.v20i1.4754>
- Dahrani, D., Sari, M., Saragih, F., & Jufrizen, J. (2021). Model Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak yang Melakukan Usaha di Kota Medan). *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 21(02). <https://doi.org/10.29040/jap.v21i02.1513>
- Darmawati, D., & Oktaviani, A. A. (2018). Pengaruh penerapan akuntansi umkm terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM e-commerce. *Prosiding Seminar Nasional Cendekiawan*, 919–925.
- Dartini, G. A. A. S., & Jati, I. K. (2016). PEMAHAMAN AKUNTANSI, TRANSPARANSI, DAN AKUNTABILITAS PADA KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 17(3), 2447–2473.

- Deo, P. P., Pakpahan, Y., & Tampubolon, L. (2022). Pengaruh Tarif Pajak UMKM, Pemahaman Peraturan Perpajakan, dan Tingkat Kepercayaan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 4(4), 3651–3662.
- Dewi, M. (2020). IMPLEMENTASI SAK-EMKM DAN PERHITUNGAN PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN FINAL PP 46 TAHUN 2013 DAN PP 23 TAHUN 2018 BERDASARKAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2018 UMKM PAWON KUE SURABAYA. *Jurnal Ekonomi*, 1–12.
- Faisal, M., & Yulianto, A. (2019). Religiusitas, Norma Subjektif, dan Persepsi Pengeluaran Pemerintah dalam Mendukung Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Kajian Akuntansi*, 3(2), 170. <https://doi.org/10.33603/jka.v3i2.3106>
- Fitria, D. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *JABE (Journal of Applied Business and Economic)*, 4(1), 30. <https://doi.org/10.30998/jabe.v4i1.1905>
- Ikatan Akuntan Indonesia. (n.d.). *Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (EMKM)*. Retrieved September 9, 2023, from <http://www.iaiglobal.or.id/v03/standar-akuntansi-keuangan/emkm>
- Indrawan, R., & Binekas, B. (2018). Pemahaman Pajak dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UKM Understanding of Taxes and Knowledge of Taxes on Compliance with SME Taxpayers. *JURNAL RISET AKUNTANSI DAN KEUANGAN*, 6(3).
- Jayanto, P. Y. (2011). Faktor-Faktor Ketidaktepatan Wajib Pajak. *Jurnal Dinamika Manajemen*, 2(1), 48–61.
- Kastolani, O. J. Y., & Ardiyanto, Moh. D. (2017). PENGARUH TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK DAN PEMERIKSAAN TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN. *DIPONEGORO JOURNAL OF ACCOUNTING*, 6(3), 1–10.
- Ken Davos. (2013). *Factors Influencing Individual Taxpayer Compliance Behaviour*. Springer Netherlands.
- Kusuma, I. C. (2018). persepsi UMKM dalam memahami SAK EMKM. *Jurnal Akunida*, 4(2), 1–14.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan* (D. Arum, Ed.; 2019th ed.). ANDI.
- Mulyani, A. S., Nurhayaty, E., & Miharja, K. (2019). Penerapan Pencatatan dan Laporan Akuntansi Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM). *Jurnal*

*Abdimas BSI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 219–226.  
<https://doi.org/10.31294/jabdimas.v2i2.5818>

- Naomi, M. E. (2021). ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGGUNAAN INFORMASI AKUNTANSI PADA USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI KOTA TANGERANG. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis*, 9.
- Ningsih, S. S., & Saragih, F. (2020). PEMAHAMAN WAJIB PAJAK PELAKU UMKM MENGENAI PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PP NO.23 TAHUN 2018 TENTANG KETENTUAN PAJAK UMKM. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 20(1), 38–44. <https://doi.org/10.30596/jrab.v20i1.4870>
- Nurchamid, M., & Sutjahyani, D. (2018). PENGARUH PENERAPAN SISTEM E-FILING, E-BILLING DAN PEMAHAMAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SURABAYA TEGALSARI. *JEA17: Jurnal Ekonomi Akuntansi*, 3(02). <https://doi.org/10.30996/jea17.v3i02.3184>
- Oktaviani, R. M., & Adellina, S. (2016). Kepatuhan wajib pajak UKM. *Dinamika Akuntansi Keuangan Dan Perbankan*, 5(2).
- Olivianidy, N. A., Astuti, T. P., & Siddiq, F. R. (2021). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Selama Pandemi Covid-19. *Wahana Riset Akuntansi*, 9(2), 91. <https://doi.org/10.24036/wra.v9i2.112026>
- Palalangan, C. A., Pakendek, R., & Tangdialla, L. P. (2019). PENGARUH PERSEPSI WAJIB PAJAK TENTANG PENERAPAN PP NO 23 TAHUN 2018, PEMAHAMAN PERPAJAKAN DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI MAKASSAR. *Paulus Journal of Accounting*, 1(1). <https://doi.org/10.34207/pja.v1i1.27>
- Priambodo, P., & Yushita, A. N. (2017). PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN PAJAK, SANKSI PERPAJAKAN, DAN KESADARAN WAJIB PAJAK, TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KABUPATEN PURWOREJO PADA TAHUN 2017. *Jurnal Profita*, 5(5), 1–15.
- Purnairawan, E., & Sastroatmodjo, S. (2021). *Pengantar Akuntansi*. Penerbit Media Sains Indonesia.
- Putra, A. F. (2020). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM: Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, dan Modernisasi Sistem. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Perpajakan*, 7(1). <https://doi.org/10.35838/jrap.2020.007.01.1>

- Putri, A. E. (2023, March 6). *Update Ketentuan Pajak UMKM pada PP 55/2022*. Ortax Media Komunitas Perpajakan Indonesia. <https://ortax.org/update-ketentuan-pph-final-bagi-wp-bruto-tertentu-atau-pajak-umkm>
- Putri, K. J., & Setiawan, P. E. (2017). PENGARUH KESADARAN, PENGETAHUAN DAN PEMAHAMAN PERPAJAKAN, KUALITAS PELAYANAN DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK. *E-Journal Akuntansi Universitas Udayana*, 18(2), 1112–1140.
- Rahayu, S. K. (2010). *Perpajakan Indonesia: Konsep & Aspek Formal*. Graha Ilmu.
- Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan: Konsep dan Aspek Formal* (1st ed.). Rekayasa Sains.
- Redaksi DDTCNews. (2021, June 9). *Kata Kemenkop, Pemahaman UMKM Soal Pajak Masih Rendah*. DDTCNews. <https://news.ddtc.co.id/kata-kemenkop-pemahaman-umkm-soal-pajak-masih-rendah-30436>
- Rusmianto. (2011). Studi Pendahuluan Penerapan Akuntansi Pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Kota Bandar Lampung. *Jurnal Ilmiah ESAI*, 5(1).
- Saragih, F. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Pada KPP Pratama Medan Kota). *Jurnal Pajak Fakultas Ekonomi Dan Bisnis*.
- Saragih, F., & SE, H. (2017). Analisis Persepsi Pelaku Usaha Kecil Dan Menengah Tentang Penerapan Akuntansi (Studi Kasus UKM Grosir Bahan Pokok di Medan Marelan). *Kumpulan Jurnal Dosen Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*, 8.
- Sri Hartati, S. P. M. P. D. Y. N. Ö. M. M. (2020). *Akuntansi Dasar untuk SMK/MAK Kelas X*. Gramedia Widiasarana Indonesia. <https://books.google.co.id/books?id=KW8LEAAAQBAJ>
- Subekti, I., & Adib, N. (2018). PERAN PERSEPSI WAJIB PAJAK ATAS KEADILAN SISTEM PERPAJAKAN DALAM MENINGKATKAN KEPATUHAN PAJAK. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 1(3), 361–384. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2017.v1.i3.2268>
- Tristiawan, F., Aslindar, D. A., & Kristiana, S. (2021). ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI KP2KP KENDAL. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis*, 8, 63–82.

Waluyo, & Anggraini, F. (2014). FAKTOR –FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN PAJAK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Kebayoran Baru Tiga). *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti*, 1(1).

Wijaya, D. (2018). *Akuntansi UMKM* (1st ed.). Gava Media.

Wijayanti, D. W., & Sasongko, N. (2017). PENGARUH PEMAHAMAN, SANKSI PERPAJAKAN, TINGKAT KEPERCAYAAN PADA PEMERINTAH DAN HUKUM TERHADAP KEPATUHAN DALAM MEMBAYAR WAJIB PAJAK (Studi Wajib Pajak pada Masyarakat di Kalurahan Pajang Kecamatan Laweyan Surakarta). *Seminar Nasional Dan The 4th Call for Syariah Paper*.

## LAMPIRAN

### A. Draft Kuesioner

#### Data Pemilik

1. Usia :  1-5 tahun  11-15 tahun  
 6-10 tahun  >15 tahun
2. Jenis Kelamin :  Perempuan  Laki-Laki
3. Pendidikan Terakhir :  SD/SMP  Diploma  
 SMA/SMK  Sarjana  
 Lainnya,.....

#### Data UMKM

1. Lama Usaha :  1-5 tahun  11-15 tahun  
 6-10 tahun  >15 tahun
2. Jenis Usaha :  Dagang  Jasa  
 Manufaktur  Lainnya

#### Pemahaman Perpajakan

INDIKATOR	PERTANYAAN	SS	S	N	TS	STS
1. Pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.	1. Saya memahami seluruh peraturan mengenai batas waktu pelaporan SPT.					
	2. Saya mengetahui NPWP berfungsi sebagai identitas wajib pajak yang harus dimiliki setiap wajib pajak.					
2. Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan.	3. Saya mengetahui bahwa pajak berfungsi sebagai sumber penerimaan negara terbesar untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.					
	4. Saya mengetahui bahwa pajak yang disetor dapat digunakan pemerintah untuk membiayai negara.					
3. Pengetahuan mengenai sistem perpajakan.	5. Saya mengetahui dan paham mengenai sistem pemungutan pajak yang digunakan saat ini yaitu <i>self-assessment system</i> .					
	6. Saya mengetahui tarif pajak yang berlaku saat ini.					
	7. Menurut saya tarif pajak yang berlaku saat ini sudah sesuai.					

Sumber: (Y. M. P. Azmary, 2019)

## Penerapan Akuntansi

INDIKATOR	PERTANYAAN	SS	S	N	TS	STS
1. Penyusunan laporan keuangan dalam perusahaan telah dilakukan secara teratur dan <i>continue</i> .	1. Saya melakukan pencatatan (buku kas masuk dan keluar, buku utang dan piutang, buku persediaan barang, penjualan dan pembelian).					
	2. Saya mengetahui jumlah produksi tiap hari, jumlah pembelian bahan baku, gaji karyawan, dan jumlah penjualan setiap harinya.					
	3. Saya menyajikan laporan persediaan, laporan gaji karyawan, laporan jumlah biaya produksi dalam pencatatan.					
	4. Saya membuat laporan kinerja usaha.					
2. Informasi akuntansi yang dihasilkan secara manual/komputerisasi sesuai dengan SAK EMKM	5. Saya mengetahui penerapan SAK EMKM secara manual atau komputerisasi.					
	6. Saya menerapkan SAK EMKM pada usaha.					
	7. Saya melakukan pencatatan akuntansi secara manual sesuai dengan SAK EMKM.					
	8. Saya melakukan pencatatan akuntansi secara komputerisasi sesuai dengan SAK EMKM.					
3. SAK EMKM telah diaplikasikan dalam laporan keuangan perusahaan.	9. Saya menerapkan akuntansi dalam pengelolaan keuangan usaha.					
	10. Saya membutuhkan akuntansi dalam pengelolaan keuangan usaha.					
	11. Saya merasa penting untuk mempelajari akuntansi.					
	12. Akuntansi mudah dipelajari dan dipahami.					
	13. Pengelolaan keuangan menjadi rapih dengan menggunakan akuntansi.					
4. Hasil penerapan SAK EMKM dapat membantu memberikan gambaran kondisi lingkungan	14. Akuntansi memberikan informasi yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan demi kelangsungan usaha dimasa depan.					
	15. Akuntansi membantu dalam mengontrol keuangan, mengevaluasi					

internal/eksternal usaha.	kinerja, dan melakukan perencanaan untuk masa depan.					
	16.Saya dapat membuat laporan informasi khusus pajak dalam usaha berdasarkan penerapan akuntansi.					
	17.Informasi akuntansi pajak memberikan manfaat terhadap jumlah pajak yang akan dibayarkan.					

Sumber: (Y. M. P. Azmary, 2019)

### Kepatuhan Wajib Pajak

INDIKATOR	PERTANYAAN	SS	S	N	TS	STS
1.Kepatuhan mendaftarkan diri ke kantor pajak	1.Setiap wajib pajak harus memiliki NPWP					
	2. Untuk mendapatkan NPWP harus mendaftarkan diri ke kantor pajak.					
2.Kepatuhan dalam menghitung pajak.	3.Saya menghitung kewajiban angsuran pajak penghasilan saya.					
	4.Saya mampu melakukan perhitungan pajak dengan benar.					
3.Kepatuhan dalam membayar pajak.	5.Saya membayar pajak penghasilan yang terutang tepat waktu.					
	6.Saya tidak pernah menunggak pembayaran pajak.					
	7.Saya bersedia membayar kewajiban pajak saya beserta tunggakan pajaknya.					
	8.Saya membayar kekurangan pajak penghasilan yang ada sebelum dilakukan pemeriksaan.					
4.Kepatuhan pelaporan oleh wajib pajak.	9.Saya mengisi SPT (Surat Pemberitahuan) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.					
	10.Saya melaporkan SPT yang telah diisi dengan tepat waktu sebelum batas waktu berakhir.					
	11.Saya mengisi SPT dengan jujur.					

Sumber: (Y. M. P. Azmary, 2019)

### B. Tabulasi Hasil Jawaban Kuesioner Variabel Pemahaman Perpajakan (X1)

No Soal	Jawaban											
	Sangat Tidak Setuju (1)		Tidak Setuju (2)		Netral (3)		Setuju (4)		Sangat Setuju (5)		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	Mean
1	13	13%	18	18%	25	25%	28	28%	16	16%	100	3.16
2	6	6%	6	6%	17	17%	28	28%	43	43%	100	3.96
3	7	7%	4	4%	21	21%	37	37%	31	31%	100	3.81
4	5	5%	5	5%	23	23%	39	39%	28	28%	100	3.80
5	15	15%	19	19%	22	22%	34	34%	10	10%	100	3.05
6	11	11%	11	11%	23	23%	39	39%	16	16%	100	3.38
7	15	15%	16	16%	36	36%	23	23%	10	10%	100	2.97

### C. Tabulasi Hasil Jawaban Kuesioner Variabel Penerapan Akuntansi (X2)

No Soal	Jawaban											
	Sangat Tidak Setuju (1)		Tidak Setuju (2)		Netral (3)		Setuju (4)		Sangat Setuju (5)		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	Mean
1	1	1%	4	4%	6	6%	30	30%	59	59%	100	4.42
2	4	4%	11	11%	8	8%	37	37%	40	40%	100	3.98
3	6	6%	12	12%	10	10%	39	39%	33	33%	100	3.81
4	21	21%	12	12%	13	13%	35	35%	19	19%	100	3.19
5	14	14%	16	16%	9	9%	39	39%	22	22%	100	3.39
6	21	21%	14	14%	14	14%	32	32%	19	19%	100	3.14
7	23	23%	15	15%	14	14%	30	30%	18	18%	100	3.05
8	24	24%	16	16%	15	15%	28	28%	17	17%	100	2.98
9	3	3%	3	3%	15	15%	43	43%	36	36%	100	4.06
10	2	2%	3	3%	7	7%	32	32%	56	56%	100	4.37
11	0	0%	6	6%	17	17%	33	33%	44	44%	100	4.15
12	19	19%	13	13%	36	36%	22	22%	10	10%	100	2.91
13	0	0%	3	3%	6	6%	45	45%	46	46%	100	4.34
14	0	0%	5	5%	13	13%	41	41%	41	41%	100	4.18
15	1	1%	1	1%	16	16%	37	37%	45	45%	100	4.24

16	13	13%	13	13%	18	18%	30	30%	26	26%	100	3.43
17	12	12%	11	11%	16	16%	33	33%	28	28%	100	3.54

#### D. Tabulasi Hasil Jawaban Kuesioner Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

No Soal	Jawaban											
	Sangat Tidak Setuju (1)		Tidak Setuju (2)		Netral (3)		Setuju (4)		Sangat Setuju (5)		TOTAL	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	Mean
1	2	2%	11	11%	15	15%	32	32%	40	40%	100	3.97
2	4	4%	11	11%	16	16%	36	36%	33	33%	100	3.83
3	14	14%	15	15%	16	16%	34	34%	21	21%	100	3.33
4	19	19%	13	13%	23	23%	30	30%	15	15%	100	3.09
5	16	16%	16	16%	17	17%	33	33%	18	18%	100	3.21
6	18	18%	18	18%	17	17%	27	27%	20	20%	100	3.13
7	24	24%	23	23%	12	12%	28	28%	13	13%	100	2.83
8	19	19%	22	22%	16	16%	26	26%	17	17%	100	3.00
9	12	12%	17	17%	14	14%	33	33%	24	24%	100	3.40
10	13	13%	20	20%	16	16%	33	33%	18	18%	100	3.23
11	11	11%	8	8%	21	21%	33	33%	27	27%	100	3.57

### E. Distribusi Nilai R Tabel

#### DISTRIBUSI NILAI $r_{\text{tabel}}$ SIGNIFIKANSI 5% dan 1%

N	The Level of Significance		N	The Level of Significance	
	5%	1%		5%	1%
3	0.997	0.999	38	0.320	0.413
4	0.950	0.990	39	0.316	0.408
5	0.878	0.959	40	0.312	0.403
6	0.811	0.917	41	0.308	0.398
7	0.754	0.874	42	0.304	0.393
8	0.707	0.834	43	0.301	0.389
9	0.666	0.798	44	0.297	0.384
10	0.632	0.765	45	0.294	0.380
11	0.602	0.735	46	0.291	0.376
12	0.576	0.708	47	0.288	0.372
13	0.553	0.684	48	0.284	0.368
14	0.532	0.661	49	0.281	0.364
15	0.514	0.641	50	0.279	0.361
16	0.497	0.623	55	0.266	0.345
17	0.482	0.606	60	0.254	0.330
18	0.468	0.590	65	0.244	0.317
19	0.456	0.575	70	0.235	0.306
20	0.444	0.561	75	0.227	0.296
21	0.433	0.549	80	0.220	0.286
22	0.432	0.537	85	0.213	0.278
23	0.413	0.526	90	0.207	0.267
24	0.404	0.515	95	0.202	0.263
25	0.396	0.505	100	0.195	0.256
26	0.388	0.496	125	0.176	0.230
27	0.381	0.487	150	0.159	0.210
28	0.374	0.478	175	0.148	0.194
29	0.367	0.470	200	0.138	0.181
30	<b>0.361</b>	0.463	300	0.113	0.148
31	0.355	0.456	400	0.098	0.128
32	0.349	0.449	500	0.088	0.115
33	0.344	0.442	600	0.080	0.105
34	0.339	0.436	700	0.074	0.097
35	0.334	0.430	800	0.070	0.091
36	0.329	0.424	900	0.065	0.086
37	0.325	0.418	1000	0.062	0.081

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### 1. DATA PRIBADI

Nama : Almira Zulaika  
NPM : 1905170143  
Tempat dan Tanggal Lahir : Depok, 27 April 2000  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Anak Ke : 1 dari 4 bersaudara  
Alamat : Jl. Bambu Gg. Kantil, Ds. Helvetia, Labuhan Deli  
Email : almirazulaika@gmail.com

### 2. DATA ORANG TUA

Nama Ayah : Alm. Syawaluddin  
Pekerjaan : -  
Nama Ibu : Yusnita  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Alamat : Jl. Bambu Gg. Kantil, Ds. Helvetia, Labuhan Deli  
Email : -

### 3. DATA PENDIDIKAN FORMAL

Sekolah Dasar : SDIT Rahmaniyyah Depok  
Sekolah Menengah Tingkat Pertama : SMP PAB 2 Helvetia  
Sekolah Menengah Tingkat Atas : SMA Dharmawangsa Medan  
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Medan, .....2023

(Almira Zulaika)